



MINGGU IV OKTOBER 2023

• TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 •

# info indonesia

Harga @ Rp 20.000,-

## GIBRAN MAHFUD BEREBUT JAWA



Road to  
Election  
2024



PDIP TAK MAU  
PECAT, GIBRAN  
NGGAK MAU  
MUNDUR

GERINDRA  
MAKIN PEDE  
DI PILKADA  
2024

GANJAR  
MAHFUD  
MELAWAN  
JOKOWI

AMIN  
MAKIN  
YAKIN  
MENANG

PRABOWO  
GIBRAN  
MELAMBUNG  
KE LANGIT

TUGAS KSAD  
BARU JAGA  
KONDUSIVITAS  
PEMILU

DPR  
PASTIKAN  
PILKADA  
DIMAJUKAN



“Ketika Mas Gibran mengambil pilihan lain, yaitu mencalonkan dirinya sebagai cawapres bertentangan dengan garis keputusan politik partai. Maka dengan sendirinya dia keluar dari aturan main kepartaian itu”

**Ahmad Basarah**



## Pertarungan Elite

**D**rama politik yang disajikan para elite partai di Pemilu 2024 ini memang berbeda jauh dari skenario. Ada banyak pertarungan yang terjadi di tingkat atas yang dikhawatirkan berpengaruh hingga ke tingkat daerah.

Di Pemilu 2024 ini, kita bukan hanya menonton persaingan antara tiga pasangan capres dan cawapres, tapi juga pertarungan antara klan. Seperti diketahui klan Megawati dalam beberapa periode ini mendominasi politik Indonesia.

Kekuatan PDIP semakin menjulang tinggi dengan sosok Joko Widodo selama dua periode. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, dengan lantang Megawati mengatakan kalau Jokowi adalah petugas partai yang ditugaskan menjadi Presiden RI.

Tidak bisa dipungkiri, sosok Megawati cukup mendominasi. Meski terkadang kata-katanya mengandung kontroversi namun seperti semua memaklumi.

Namun di Pemilu 2024 ini, dominasi klan Megawati dengan PDIP-nya akan menghadapi ujian berat dari klan baru, yakni Joko Widodo bersama partai koalisinya.

Di balik ketenangannya, Joko Widodo memainkan manuver-manuver politik lewat tangan anak-anaknya. Secara terang-terangan petugas partai ini melakukan perlawanan pada sang pimpinan.

Kaesang Pangarep memilih sebagai Ketua Umum PSI daripada menjadi kader PDIP. Gibran Rakabuming Raka menerima tawaran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto yang didukung Koalisi Indonesia Maju.

Sebagai kader PDIP, Gibran ditugaskan sebagai juru kampanye pemenangan Ganjar-Mahfud MD. Namun tugas itu diabaikannya dan memilih sebagai cawapres.

Di sisi lain, pimpinan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto adalah orang-orang Joko Widodo di kabinet.

Sementara saat Megawati dan Jokowi terlibat perang politik, situasi menguntungkan ada pada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang fokus pada kegiatan politik mereka.

Banyak yang meragukan kalau mereka akan menjadi pemenang di Pilpres 2024 nanti, namun tudingan itu dijawab dengan soliditas koalisi partai pendukungnya.

Drama politik yang dilakoni para elit partai ini menjadi sajian utama kami di Info Indonesia edisi kali ini.

Selain persaingan tingkat elit, kami juga menyajikan informasi tentang dinamika politik di daerah yang secara tidak langsung dipengaruhi di tingkat pusat.

Sosok Gibran yang dianggap sebagian orang fenomenal ternyata tidak semua disukai anak muda, khususnya kalangan mahasiswa. Meski menjabat sebagai Wali Kota Solo, namun pengalaman politiknya tidak sematang tokoh muda lainnya.

Bagaimana tanggapan kaum milenial terutama dari kalangan mahasiswa terhadap Gibran Rakabuming bisa dibaca di Info Dapil.

Kami juga mencermati soal suara rakyat khususnya dari kalangan masyarakat di Sumatera. Tidak bisa dipungkiri, di Pemilu 2024 ini suara masyarakat Jawa akan menentukan sekali kemenangan para capres.

Sebaran masyarakat Jawa di seluruh Indonesia melalui program transmigrasi ternyata menjadi potensi dahsyat untuk mendulang suara di Pemilu 2024. Suara mereka dikenal teguh dan sulit dipengaruhi yang menjadi khas suara tradisional.

Kekuatan suara masyarakat Jawa di Pulau Sumatera menjadi salah satu bahasan menarik untuk dibaca.

Selama membaca!!!●







“Tidak mungkin Gibran terkesan melawan instruksi Ketum PDIP Megawati terkait percapresan Ganjar-Mahfud kalau tidak merasa mendapatkan suaka politik dari Presiden Jokowi”

Subiran Paridamos

# GANJAR-MAHFUD MELAWAN JOKOWI

**Posisi berseberangan antara Presiden Joko Widodo dengan partai politik yang membesarkannya, yaitu PDIP termasuk elite-elite dan utamanya Megawati Soekarnoputri, semakin kentara jelas. Musababnya, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, sudah resmi menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.**

Megawati dalam beberapa kali kesempatan telah menyampaikannya satire yang mengarah kepada Jokowi. Misalnya, saat membahas sosok cawapres yang akan maju dari koalisi PDIP untuk mendampingi mantan Ganjar Pranowo yang didaulat dan disepakati parpol-parpol koalisi sebagai capres, menyebutkan bahwa mekanisme penentuannya bukan seperti urusan keluarga.

Pernah juga Megawati membuat sindiran yang dinilai tertuju kepada Jokowi, melalui sebuah imbauan kepada kader-kader partai, dengan menyatakan jangan melirik partai lain. Bahkan, di acara HUT ke-50 PDIP, 10 Januari 2023, Megawati secara terang-terangan menyebut Jokowi tidak akan jadi apa-apa jika tidak masuk PDIP.

Perang urat syaraf Jokowi dengan Megawati makin kentara terlihat oleh publik ketika keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, khususnya untuk perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA), Almas Tsabirruu Re A.

MK memutuskan menerima dalil gugatan Almas yang meminta agar tokoh muda berpengalaman sebagai kepala daerah, yang dia sebutkan dalam dokumen permohonan perkara, contohnya ialah sosok Gibran yang seharusnya memiliki kesempatan menjadi peserta Pilpres 2024, baik itu sebagai capres maupun cawapres.

Alhasil, Ketua MK, Anwar Usman, yang juga paman Gibran, mengubah bunyi frasa Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur syarat batas usia minimum capres-cawapres sebesar 40 tahun.

Dalam

putusannya, MK menambahkan frasa, “atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).”

Akibat putusan itu, isu yang menyebut Jokowi memanfaatkan MK untuk memuluskan langkah putra sulungnya menjadi cawapres Prabowo, kini telah menjadi fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Sebab, Gibran akhirnya resmi didaftarkan sebagai cawapres Prabowo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gibran juga mendapat restu dari Jokowi dan seluruh parpol anggota KIM yaitu Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, PSI, Partai Garuda, hingga Partai Prima.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, menilai, keretakan Jokowi dengan Megawati semakin terlihat panas ketika jagoan dia, Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD memiliki lawan yang setara yaitu Prabowo-Gibran.

“Karena fakta politiknya Gibran telah dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo Subianto, sementara kita tahu Gibran adalah kader PDIP, dan PDIP telah mengusung Ganjar-Mahfud. Maka tentu secara etika politik Gibran seharusnya mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Dan secara konstitusional partai, seharusnya Megawati segera memecat Gibran untuk menjaga dan melindungi marwah dan garis kehormatan kaderisasi partai,” ujar Subiran saat dihubungi Info Indonesia, Kamis, 26 Oktober 2023.

Menurut magister ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu, Megawati melalui Ganjar-Mahfud akan berperang habis-habisan dengan Jokowi yang memegang kendali atas Prabowo-Gibran.

“Karena tidak mungkin Gibran menjadi cawapres Prabowo tanpa restu dari Presiden Jokowi. Tidak mungkin Gibran terkesan melawan instruksi Ketum PDIP Megawati terkait percapresan

Ganjar-Mahfud kalau tidak merasa mendapatkan suaka politik dari Presiden Jokowi. Artinya, secara komunikasi politik, pencapresan Gibran adalah bentuk ketidakpatuhan kepada Megawati dan PDI Perjuangan,” tuturnya.

Di samping itu, Biran juga mengamati visi misi yang dibuat kedua paslon, baik Ganjar-Mahfud maupun Prabowo-Gibran terlihat serupa, yaitu sama-sama akan melanjutkan Pembangunan Jokowi. Hanya saja, dia meyakini PDIP bakal kehilangan basis pemilih Jokowi lantaran darah dag-ingnya malah cabut dari partai banteng.

“Meskipun Jokowi menyatakan mendukung ketiga capres (termasuk Anies Baswedan-Muhammad Iskandar), dan menyatakan dukungannya ke Gibran hanya dalam kapasitas sebagai ayah yang mendoakan dan merestui, tapi secara komunikasi politik preferensi politik Presiden Jokowi jelas dan tegas ke Prabowo-Gibran. Dengan demikian, Prabowo-Gibran adalah bentuk tegas dari titik klimaks perpecahan Megawati dan Jokowi,” ujar Biran.

Mirisnya, pendiri Sekolah Peradaban itu menduga hubungan Megawati dan Jokowi akan mengulang hubungan yang tidak harmonis antara Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yakni, politik tidak saling tegur dan tidak saling bicara.

“Itulah komunikasi politik tertinggi jika tidak senang dengan seseorang. Dan itulah salah satu ciri psikologi politik perempuan jika Presiden Jokowi tidak bertabayan dengan Megawati terkait Gibran ini sampai selesai Pilpres 2024,” ungkapnya.

Lebih dari itu, Biran meyakini pecah kongsi Megawati dan Jokowi ini akan merugikan PDIP. Sebab Jokowi adalah presiden yang di akhir masa jabatannya

mencatatkan tingkat kepercayaan publik mencapai 80 persen. Dia menafsirkan, tingkat kepuasan terhadap Jokowi itu menggambarkan basis massa yang loyal, selain dari kader-kader PDIP.

“Dan yang lebih parah lagi, karena Jokowi sudah terlanjur dikultuskan di PDIP sebagai kader terbaik, sehingga Prabowo-Gibran yang resmi mendaftar ke KPU ini tentu pukulan hebat secara psikologi politik bagi kader PDIP. Sehingga jangan sampai kader PDIP di seluruh Indonesia mengekspresikan rasa kecewa dengan mengeluarkan wacana sinisme terhadap Jokowi, semisal tidak tahu diri, pengkhianat, kancang lupa kulit, atau politik dinasti,” urainya.

Secara komunikasi politik, Biran menilai dampak tersebut akan merugikan PDIP, termasuk capres dan cawapres yang diusungnya, Ganjar-Mahfud. Sebab, loyalitas basis massa Jokowi yang tidak terafiliasi dengan PDIP, diduga masih banyak tersebar di berbagai partai dan relawan. Hal itu berpotensi mendukung total Prabowo-Gibran apabila ada kampanye politik yang tidak arif dan bijaksana.

“Perpecahan Jokowi dan Megawati potensi menguntukan Prabowo-Gibran secara elektoral, mengingat basis massa loyal Presiden Jokowi yang tidak terafiliasi dengan PDIP dan koalisi akan merapat ke Prabowo-Gibran. Selain itu, basis massa Jawa Tengah yang seharusnya menjadi markas besar PDIP dan Ganjar untuk meraup suara, akan terpecah dengan keberadaan Gibran. Apalagi kalau sampai Gibran menang di Jawa Tengah, tentu itu pukulan telak bagi PDIP dan Ganjar,” terangnya.

“Ditambah, jika terdapat wacana petugas partai yang selama ini melekat kepada Presiden Jokowi dan Gibran akhirnya hilang, ini akan mendapatkan sentimen positif dari public, utamanya pemilih milenial dan gen Z yang jumlahnya 56 persen,” sambungnya.

Oleh karena itu, Biran mengingatkan Megawati agar menggunakan strategi politik kebangsaan untuk melawan Jokowi yang sudah memanfaatkan jabatan presiden yang didapat dari dukungan pencalonan yang diberikan PDIP. Sehingga, pada saat pencoblosan nanti, Ganjar-Mahfud dapat menjadi lawan tangguh Prabowo-Gibran yang sulit ditaklukan.

“Megawati seharusnya menggunakan pola komunikasi negarawan agar memberikan contoh yang baik bahwa perbedaan politiknya dengan Jokowi tidak menjadikan konflik wacana sebagaimana yang terjadi di sosial media kita beberapa hari terakhir ini. Pola komunikasi negarawan dilakukan PDIP dan Megawati dengan mengikhlaskan Jokowi dan Gibran tanpa wacana sinis seperti pengkhianatan dan lain-lain,” sarannya.

“Justru dengan cara ini akan menimbulkan sentimen positif bagi publik kepada koalisi PDIP. Fokus menggalang kekuatan di akar rumput untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud tanpa wacana

pengkhianat Jokowi dan Gibran, tidak menjual wacana pengkhianatan Jokowi dan Gibran sebagai marketing politik. Karena itu bukan menguntungkan, malah merugikan,” tutupnya.

•RDO





“Proyeksi saya, duet Amin bisa merangkul sebagian loyalis Prabowo di 2019, yang kontra dengan penunjukan Gibran sebagai cawapres Prabowo”

*Hasyibulloh Mulyawan*



# AMIN MAKIN YAKIN MENANG

**Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan berjuluk Amin tersebut juga telah menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto.**

“**S**esuai dengan apa yang kami harapkan untuk mendaftar di hari pertama hari ini,” kata Anies di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPU karena telah membantu dalam membimbing untuk menyiapkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Terima kasih telah diberikan bimbingan, sehingga pagi hari ini membawa dokumen itu dengan lengkap,” jelas Anies.

Dia mengharapkan, Pilpres 2024 dapat berjalan dengan lancar. Semua pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan memberikan rasa adil bagi seluruh pasangan yang bertarung di Pilpres

yang dipimpin Hasyim Asy'ari itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai panitia penyelenggara Pemilu Serentak 2024.

“Kami percaya bahwa KPU akan melakukan proses verifikasi dan hingga nanti pelaksanaan juga dengan profesional dan ini menjadi satu awalan terlaksana aman, damai, tenang, teduh,” ungkap Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, dalam proses pemilu ini, seluruh elemen masyarakat harus menjaga persatuan. Pada dasarnya, seluruh masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang sama.

“Itu yang ingin kita jaga sama-sama,” kata Anies.

Di Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin akan mengedepankan isu-isu perubahan. Gagasan perubahan ini diharapkan nantinya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terutama isu yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami membawa gagasan perubahan, perubahan untuk dirasakan keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan kebutuhan pokok terjangkau,” jelas Anies.

Dia berharap dengan gagasan perubahan ini, para petani, peternak, dan nelayan bisa semakin sejahtera kehidupannya. Selain itu, dia akan berupaya

menciptakan kesetaraan dalam bidang pendidikan dan perlindungan bagi warga negara.

“Gagasan dasarnya adalah perubahan menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan, itu yang kami bawa,” kata Anies.

Dalam mewujudkan gagasan tersebut, Koalisi Perubahan nantinya akan menyusun tim sukses. Nantinya, timses ini akan merumuskan program kerja yang akan dilakukan Anies dan Muhaimin di masa kampanye.

Kendati begitu, Anies mengaku sampai saat ini, pihaknya belum menyusun timses yang dimaksud tersebut. Dia menambahkan bahwa dalam waktu dekat struktur dari timses itu akan diumumkan ke publik.

Sementara itu, calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, mengatakan, Koalisi Perubahan yang dibentuk oleh Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan menjadi gabungan partai politik yang akan membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia.

“Ini akan jadi gelombang besar perubahan bangsa Indonesia,” tegas Cak Imin.

Dia meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar duet Amin bisa amanah dalam mengawal kepentingan rakyat. “Ya Allah jadikanlah pasangan ini pasangan yang istiqomah, jadikanlah Amin mampu melaksanakan amanah,” jelas Cak Imin.

“Ya Allah menangkanlah pasangan ini demi rakyatmu adil, makmur, sejahtera. Ya Allah tolonglah seluruh yang sedang menderita, berikanlah kesehatan pada semua yang hadir,” sambung Cak Imin.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, memproyeksikan, duet Amin akan menggaet para loyalis Prabowo Subianto yang sempat mendukung di Pilpres 2019.

Iwan menilai, banyak loyalis yang sempat memberikan dukungan di 2019 yang kecewa dengan keputusan Prabowo Subianto yang menjadikan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

“Proyeksi saya, duet Amin bisa merangkul sebagian loyalis Prabowo di 2019, yang kontra dengan penunjukan Gibran sebagai cawapres Prabowo,” kata Iwan.

Dia berpendapat bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menunjukkan chemistry yang cukup kuat. Lantaran banyak sekali komentar positif dari masyarakat terhadap pasangan tersebut.

Apalagi, duet AMIN ini telah mendapatkan dukungan dari mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj. Menurutnya, dukungan Said Aqil akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dari duet Amin di Pilpres mendatang.

“Gimmick politik Amin juga mulai menunjukkan chemistry yang bisa diterima oleh generasi muda juga kalangan santri, terlebih mantan Ketum PBNU, KH Said Aqil Siraj mendukung Amin dalam peringatan Hari Santri Nasional di Magelang,” kata Iwan.

Dia menyampaikan, gagasan perubahan yang digaungkan oleh duet Amin ini menjadi sebuah oase. Lantaran, dalam pertarungan pilpres kali ini ada dua kader PDIP yang maju, yakni Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pendamping Prabowo Subianto.

Menurutnya, PDIP akan terus berkonflik dengan situasi tersebut. Kesempatan ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh duet Amin untuk mengambil ceruk pemilih dari kedua pasangan tersebut.

“Limpahan suara justru mengarah kepada Amin, ini yang perlu kita cermati lebih jauh, apakah gagasan perubahan yang menjual atau lebih pada kekecewaan,” tandas Iwan. ●RDO

2024.

“Insya Allah Pilpres, Pemilu, akan berjalan dengan tertib, rapi, jujur, adil, dan memberikan hasil yang nantinya kredibel di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Semoga ini menjadi awalan yang baik bagi perjalanan untuk kebaikan bangsa,” terang Anies.

Dia berharap KPU bisa bekerja secara profesional dalam memproses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Anies percaya bahwa lembaga







“Variabel Gibran akan tetap berpotensi untuk menyumbangkan insentif elektoral Prabowo”

Yusak Farchan

# INFO PILPRES

Minggu IV • Oktober 2023

5

## PRABOWO-GIBRAN MELAMBUNG KE LANGIT

**Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu, 25 Oktober 2023.**

**S**ebelum ke KPU, Prabowo juga memperkenalkan secara resmi Gibran sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan ribuan pendukungnya. Kelakarnya kepada ribuan pendukung yang memenuhi Indonesia Arena, pemilihan putra sulung Presiden Jokowi itu tidaklah salah.

“Bagaimana nggak salah pilihanku? Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Terlalu muda nggak? Gue terlalu tua nggak?” ujar Prabowo.

Tak lupa ia menyampaikan terima kasihnya kepada partai politik pengusung, relawan, dan pendukungnya yang akan mengantarkannya menghadapi Pilpres 2024. Ia pun meminta doa dan restu untuk mendapatkan mandat rakyat demi memimpin Indonesia pada periode 2024-2029.

Saat ini, Indonesia menurutnya tengah berada pada titik penting dalam sejarah bangsa. Titik di mana Indonesia dapat menjadi negara maju dengan tetap memprioritaskan rakyat di atas segala-galanya.

Seluruh kekayaan Indonesia haruslah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Dia menegaskan, itulah tekad dan perjuangannya bersama Gibran dalam menghadapi Pilpres 2024.

Sementara itu, Gibran dalam pidato politik pertamanya, menyampaikan sejumlah program yang ditawarkan kepada masyarakat. Pertama adalah Kartu Indonesia Sehat untuk golongan lanjut usia (lansia).

Program tersebut akan menjadi pendukung dari kebijakan yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Gibran juga menawarkan program Kredit Startup Milenial. Program tersebut bertujuan untuk membantu bisnis generasi muda yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dia memang menekankan pentingnya generasi muda dan santri dalam pembangunan Indonesia. Dengan tujuan utamanya bersama Prabowo adalah melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan yang sudah dijalankan

pemerintahan sebelumnya.

“Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan, sekali lagi generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri,” ujar Gibran.

Berdasarkan hasil penelitian lembaga survei, duet Prabowo-Gibran dinilai dapat menjadi lawan berat pasangan lain karena diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari delapan partai politik. Yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Garuda, Partai Prima, dan Partai Gelora.

Selain didukung koalisi gemuk, sejumlah pihak pun menilai, duet Prabowo-Gibran akan dapat dukungan yang cukup besar. Gibran dinilai dapat menggaet pemilih yang mengagumi sosok bapak kandungnya, yakni Presiden Jokowi.

Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai, keputusan KIM dan Prabowo yang meminang Gibran menjadi cawapres merupakan hal yang cukup tepat karena dapat menambah jumlah dukungan di Pilpres 2024.

Menurut Yusak, kondisi usia Prabowo dan Gibran yang terpaut kurang lebih 40 tahun itu menjadi tantangan tersendiri bagi duet tersebut untuk bekerja lebih ekstra dalam meraih segmentasi pemilih.

Yusak menilai, baik Prabowo atau Gibran saat ini

memiliki irisan pemilih yang berbeda, sehingga dapat menambah elektabilitas untuk bersaing di Pilpres 2024.

Di sisi lain, Yusak menyebutkan posisi Gi-

bran yang merupakan putra Presiden Jokowi berpotensi besar dapat menarik pemilih yang mengagumi sosok bapak kandungnya.

“Dari irisan pemilih, pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Gibran berbeda. Karena Gibran mewarisi gen politik Jokowi, maka dari itu pendukung Jokowi berpotensi besar memilih Prabowo, meskipun tidak 100 persen. Jadi memang ada potensi tambahan pemilih,” kata Yusak, Jumat, 27 Oktober 2023.

Yusak menuturkan, posisi Gibran yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Wali Kota Solo dan peran Presiden Jokowi dinilai akan mampu menarik suara di Jawa Tengah untuk Prabowo. Selain itu, juga memperkecil selisih kekalahan dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Diketahui, Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang tercatat sebagai basis penyumbang suara terbesar PDIP dalam dua kali Pemilu di Indonesia, khususnya saat Jokowi melaju sebagai capres di Pilpres 2014 dan 2019.

“Variabel Gibran akan tetap berpotensi untuk menyumbangkan insentif elektoral Prabowo. Dalam konteks pertarungan di Jawa Tengah, variabel Gibran berpotensi memperkecil selisih kekalahan Prabowo dengan Ganjar. Walaupun bagaimanapun Jawa Tengah adalah kandang nasionalis yang cenderung dikuasai Ganjar,” tutur Yusak.

“Dua kali pilpres terakhir, selisih kekalahan dari

Prabowo atas Jokowi kan sangat lebar di Jateng. Inilah yang sedang menjadi fokus Prabowo bagaimana memperkecil gap kekalahan di Jateng seraya berusaha memperbesar kemenangan di Jawa Timur yang akan menjadi battle ground dan penentu kemenangan secara nasional,” sambungnya.

Menurut Yusak, jika selisih kekalahan di Jateng bisa diperkecil dan selisih kemenangan di Jatim bisa diperbesar, maka potensi Prabowo-Gibran untuk mengalahkan Ganjar Mahfud dan Anies-Muhaimin cukup terbuka.

Selain itu, jika hasil Pilpres 2024 berpotensi dua putaran dengan skema head to head, baik Prabowo-Gibran vs Ganjar-Mahfud atau Prabowo-Gibran vs Anies-Muhaimin, maka kedua pasangan itu berpotensi akan meraup suara dari para pendukung dua pasangan lain.

Yusak mengungkapkan, potensi meraup suara besar jika skema Pilpres dua putaran karena saat ini posisi Prabowo yang berada di titik tengah dan bisa menjembatani dua kelompok yang secara ideologis berseberangan.

“Jika pilpres berlangsung dua putaran dengan skema head to head Prabowo-Gibran vs Ganjar Mahfud, maka Prabowo berpotensi mendapat limpahan suara dari pendukung Anies. Begitu juga jika head to head Prabowo-Gibran vs Anies-muhaimin, suara pendukung Ganjar berpotensi lari ke Prabowo,” ungkap Yusak.

Kendati demikian, kondisi usia yang terpaut cukup jauh antara Prabowo-Gibran dinilai bakal jadi tantangan tersendiri untuk mengemas dan strategi program memenangkan kontesasi Pilpres 2024.

“Jadi, Prabowo-Gibran harus mampu menjawab ekspektasi kelompok muda dengan cara untuk menghadirkan program-program inovatifnya.

Gagasan Gibran terkait kredit bagi milenial misalnya, harus dioperasionalkan dengan detail seperti apa skemanya. Programnya harus konkret dan solutif,” terang Yusak.

Yusak menambahkan, sosok Gibran yang cukup dikenal sebagai representasi anak muda harus mampu mengembangkan program kerja yang inovatif untuk membentuk dan mewujudkan kejayaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.

“Apa yang telah diimajinasikan kelompok muda terkait masa depan bangsa kan sebenarnya itu cukup simple, yakni bagaimana Indonesia bisa menjadi negara kuat dan maju ke depan,” ujar Yusak.

“Jadi, program-program inovatif berbasis kreativitas harus dihadirkan jika Prabowo-Gibran ingin mendapatkan suara kelompok milenial. Gibran harus mampu melakukan lompatan-lompatan besar yang visioner ke depan,” kata Yusak. •RDO





“Dalam situasi yang sulit, pengawas pemilu harus mampu kreatif, atraktif, dan progresif,” ujar Lolly.



Lolly Suhenty

# PEMILU DI LUAR NEGERI HARUS DIKAWAL KETAT

**Badan Pengawas Pemilu menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengawasan Luar Negeri dalam Pemilu 2024, Selasa, 24 Oktober 2023. Pimpinan Bawaslu memberikan arahan mengenai strategi pengawasan di luar negeri terhadap 183 orang Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) yang terbentuk dari 61 negara.**

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengingatkan 183 orang Panwas LN menyortir persoalan terkait daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri. Pasalnya, persoalan DPT sangat krusial karena dapat mempengaruhi ketersediaan pencetakan logistik surat suara.

“DPT masuk ‘pre-election’. Nah, perhatikan jika DPT ini bermasalah, seperti ketersediaan surat suara akan bermasalah, (maka) pada hari pemungutan suara akan mendapat menjadi masalah juga,” tegasnya.

Dia menyampaikan, rakornas ini untuk juga untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh pengawas luar negeri. Bagja berharap, pengawasan di luar negeri bisa berjalan dengan baik dan tanpa adanya hambatan.

“Agar kemudian pengawasan di luar negeri berjalan optimal dan bisa dilakukan dengan baik. Karena dua juta WNI itu sangat berharga suaranya di luar negeri,” terang Bagja.

Dalam hal pengawasan di luar negeri, pihaknya juga telah memetakan daerah-daerah yang cukup rawan. Dia menjelaskan, untuk wilayah yang berdekatan dengan Indonesia akan melakukan pemungutan suara lebih awal.

“Karena beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan waktunya dekat dengan Indonesia, mereka akan melakukan pemungutan suara lebih dahulu daripada Indonesia,” kata Bagja.

Dia menjelaskan, bagi warga Indonesia yang berada di luar negeri nanti akan melaksanakan pemungutan suara lebih awal. Namun, juga bisa memberikan hak suaranya pada 14 Februari atau sesuai dengan waktu yang ada

di Indonesia.

Oleh karena itu, terkait pengumuman suara di luar negeri yang lebih awal ini, Bawaslu akan melakukan pengawasan secara ketat dan melatkat terhadap proses tahapan pemungutan suara tersebut. “Sehingga, perlu kami waspadai,” sambungnya.

Dia mengatakan, pengawas luar negeri juga akan melakukan pengawasan terhadap proses kampanye. Dikhawatirkan, pada proses tahapan kampanye di luar negeri ada keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI/Polri. Maka dari itu, kampanye di luar negeri tidak luput dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu.

“Ini juga perlu diwaspadai,” kata Bagja.

Bagja menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan berbagai macam antisipasi untuk melakukan pengamanan terhadap surat suara. Bawaslu akan menyiapkan satu orang untuk menjaga kotak suara keliling (KSK).

“Jadi, jangan sampai KSK itu tidak didampingi. Itu harus didampingi pengawas TPS. Itu juga kami akan ingatkan kepada PPLN,” kata Bagja.

Dia juga memberi penjelasan terkait dengan penambahan surat suara di Paris, Prancis, yang masih dalam pertimbangan. Sebab, pihaknya saat ini masih menghitung jumlah WNI ataupun mahasiswa yang berada di Paris. Dikhawatirkan, WNI dan mahasiswa yang menuntut ilmu di Paris itu DPT-nya masih di dalam negeri.

M a -  
kanya,  
pihakn-  
y a

harus melakukan kroscek terlebih dahulu. Terkait hal ini, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui jumlah pasti WNI dan mahasiswa yang berada di Paris.

“Mahasiswa yang kemudian pindah sekolah misalnya di Paris, kemudian DPT-nya masih DPT dalam negeri. Sehingga, kemudian bisa dipindahkan ke DPT LN,” kata Bagja.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty, meminta konteks rakornas tersebut membuat peserta yang notabene Panwas LN mampu berpikir kreatif, atraktif, dan progresif.

Kreatif yang dimaksud Lolly yakni Panwas LN harus mampu menyampaikan kepada publik bagaimana pencegahan dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu dengan cara yang mudah dipahami.

Dia menambahkan, perlu pula atraktif

yang mampu ‘menembus batas’. Artinya, bila dalam menjalankan tugas Bawaslu mengalami kendala kesulitan mengawasi karena dibatasi kebijakan penyelenggara teknis pemilu, maka harus cari cara.

Sedangkan, progresif yang Lolly maksud tak lain pengawas pemilu jangan sampai putus akal apabila menghadapi kendala. Dirinya mencontohkan, apabila tidak ada aturan kampanye di luar negeri, jangan sampai membuat pengawasan kampanye di luar negeri menjadi tidak berjalan.

“Dalam situasi yang sulit, pengawas pemilu harus mampu kreatif, atraktif, dan progresif,” ujar Lolly.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi, menilai pentingnya kehadiran Sentra Pengawasan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dihadirkan di luar negeri agar berbagai bentuk penyimpangan yang merusak integritas pemilu dapat teratasi.

Berkaca pada Pemilu 2019, banyak memberikan pelajaran kepada khalayak, betapa sulitnya menegakkan keadilan pemilu di luar negeri. Dirinya memberikan contoh, kasus surat suara yang telah dicoblos bukan oleh pemilih dan ditemukannya surat suara tercoblos di suatu ruko di Kajang dan Selangor Malaysia. Selain itu, juga kasus kisruh penutupan TPS saat masih ada WNI yang antri untuk mencoblos di Sydney, Australia.

“Harapannya dengan adanya Gakkumdu dapat menegakkan demokrasi yang adil pada pemilu Indonesia, berikut bagi WNI di luar negeri,” jelasnya.

Sedangkan, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatikan, Herwyn JH Malonda, mengungkapkan, Bawaslu dan Kementerian Luar Negeri sedang mengkaji apakah dapat membentuk Pengawas TPS luar negeri atau tidak guna membantu kerja-kerja Panwas LN.

“Memang di UU Pemilu, PTPS LN tidak ada. Hanya Panwas LN. Tetapi, di Pasal 21 ayat 4 Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 memungkinkan itu. Nah, itu yang sedang kami kaji bersama Kemenlu,” kata Herwyn.

•RDO







“KPU sudah mengajukan surat untuk konsultasi melakukan perubahan (PKPU) tersebut kepada Komisi II DPR dan juga kepada Pemerintah”

*Hasyim Asy'ari*

INFO  
KPU

7

Minggu IV • Oktober 2023

# REVISI BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES KPU MINTA KONSULTASI KE DPR

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya berupaya merevisi pasal syarat batas usia minimum dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, KPU sebelumnya menyatakan tidak akan merevisi pasal tersebut.**

**P**erubahan sikap itu disampaikan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, usai menerima pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.

“KPU sudah mengajukan surat untuk konsultasi melakukan perubahan (PKPU) tersebut kepada Komisi II DPR RI dan juga kepada Pemerintah,” kata Hasyim.

Sebagai gambaran, Pasal 13 dalam PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mengatur bahwa syarat menjadi capres ataupun cawapres adalah berusia paling rendah 40 tahun. Pasal tersebut merupakan turunan dari Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Pada 16 Oktober 2023, MK membacakan putusan atas permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pasal ini sumber ketentuan batas usia minimum 40 tahun.

MK dalam amar putusannya mengubah bunyi pasal batas usia minimum capres-cawapres itu menjadi: “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Berkat putusan tersebut, Gibran bisa maju sebagai cawapres karena dia sedang menjabat sebagai wali kota Solo, meski baru berusia 36 tahun.

Pada 18 Oktober 2023 atau sehari jelang dibukanya pendaftaran capres-cawapres, Hasyim menyatakan tidak perlu merevisi PKPU sesuai putusan MK. Sebab, amar putusan MK sudah memuat norma baru terkait batas usia minimum. Karena itu, KPU hanya menerbitkan surat dinas kepada partai politik agar memedomani putusan MK tersebut.

Langkah KPU tidak merevisi PKPU tersebut lantas dikritik sejumlah pakar hukum dan pengamat pemilu. Sebagian menilai bahwa pencalonan Gibran tidak sah atau setidaknya berpotensi disengketakan karena PKPU tak diubah

sesuai putusan MK.

Kini, KPU menyatakan hendak merevisi. Hasyim mengatakan, penerbitan surat dinas merupakan langkah awal saja sebelum melakukan revisi. “Ya kan bertahap, mas, tidak boleh buru-buru, ojo kesusu, ojo grusa grusu,” ujarnya.

Hasyim membantah bahwa revisi dilakukan demi memuluskan pencalonan Gibran. Dia menegaskan bahwa revisi dilakukan sebagai konsekuensi atas munculnya putusan MK. “Penyesuaian norma karena ada putusan ini kan bukan peristiwa baru,” ujarnya.

Terkait proses revisi, Hasyim mengatakan bahwa konsultasi akan dilakukan ketika anggota DPR selesai reses dan memulai masa sedang. Ketika ditanya apakah revisi harus tuntas sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 13 November 2023, Hasyim menyebut bahwa revisi harus selesai secepatnya.

Kendati demikian, publik juga menyoroti status Gibran yang saat ini masih menjadi

kader aktif PDIP. Adapun partai yang telah lama dinakhodai Megawati Soekarnoputri itu saat ini juga sudah resmi mendaftarkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Berkaitan dengan hal itu, Hasyim menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sejatinya tidak mengatur terkait persyaratan capres dan cawapres harus menjadi anggota partai.

Oleh karena itu, status Gibran yang telah resmi menjadi cawapres dengan berbeda koalisi dengan PDIP bukan menjadi kewenangan KPU untuk menindaklanjuti, melainkan menjadi kewenangan masing-masing parpol.

“Jadi dalam UU Pemilu itu tidak ada persyaratan bahwa bakal pasangan calon harus anggota partai, yang ada kalau ada orang mau dicalonkan harus anggota partai itu kalau calon anggota DPR RI, DPR provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota. Nah, syarat calon di antaranya dibuktikan dengan kartu tanda anggota, itu kalau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan DPRD provinsi atau kabupaten/kota,” jelas Hasyim.

“Jadi untuk orang yang dicalonkan sebagai bakal pasangan calon presiden maupun wakil presiden, kepala daerah, gubernur atau wali kota, itu tidak ada syarat menjadi anggota partai politik,” sambung Hasyim.

Hasyim mengungkapkan, dalam penyerahan dokumen kelengkapan syarat capres dan cawapres, pihaknya hanya akan memeriksa berkas dokumen yang diperintahkan undang-undang sebagai syarat mendaftarkan diri di Pilpres 2023.

“Jadi yang akan diperiksa atau diverifikasi KPU itu hanya yang menjadi syarat calon. Karena itu tidak menjadi syarat calon, maka tidak diperiksa KPU,” ungkap Hasyim.

**KPU Jaga Netralitas**

Status Gibran Rakabuming yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi saat juga telah menjadi sorotan publik. Hal itu lantaran posisi Gibran yang telah menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan posisi Jokowi yang menjabat seorang presiden dikhawatirkan memunculkan cawe-cawe politik di Pilpres 2024.

Kendati demikian, Hasyim menegaskan, KPU selaku penyelenggara pemilu akan tetap menjalankan tugas secara profesional, termasuk menjaga netralitasnya meski Gibran merupakan anak Presiden Jokowi.

“Saya kira Presiden enggak punya anak ya. Yang punya anak kan orangnya, presiden itu jabatan. Ketua KPU enggak punya anak, yang punya anak Hasyim Asy'ari,” ujar Hasyim.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menilai putusan MK terkait syarat capres dan cawapres berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman menjadi kepala daerah tak sah, lantaran Ketua MK Anwar Usman tidak mundur dari pemeriksaan dan putusan perkara.

Denny menganggap tak mundurnya Anwar ketika memutuskan gugatan ini telah memunculkan benturan kepentingan lantaran statusnya sebagai paman dari Gibran.

“Akibat dari tidak mundurnya Anwar Usman tersebut, maka Putusan 90 menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” kata Denny, Senin, 23 Oktober 2023.

Denny berpendapat majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto menunjukkan ada keterkaitan dengan putusan yang dikabulkan MK. Ia juga menyinggung putusan MK itu memiliki keterkaitan dengan keluarga Anwar Usman. Karenanya, ia menilai kondisi ini dilarang dalam Peraturan MK tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Saya kembali berkirin surat ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran etika Anwar Usman. Surat mana terlampir dan melengkapi surat pengaduan saya sebelumnya pada 27 Agustus 2023,” kata dia.

Karena itu, Denny berkesimpulan putusan MK itu tidak bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran sebagai paslon capres-cawapres di KPU. Jika KPU tetap menerima berkas pendaftaran Prabowo-Gibran, maka Denny mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan sengketa administrasi ke Bawaslu.

“Untuk membatalkan penetapan pasangan calon tidak mempunyai dasar hukum tersebut,” kata dia.

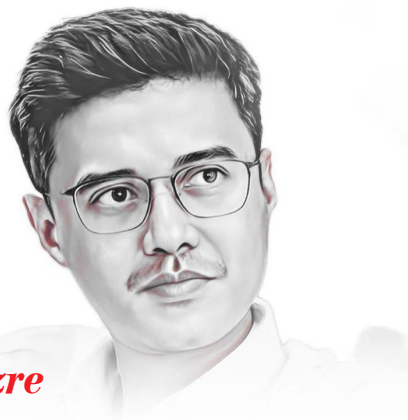
•RDO





“Jika Andre Rosiade dan Fadly Amran Bersatu, ada peluang besar untuk menjadi pemenang di Pilgub Sumbar 2024 dan bisa menjadi lawan serius bagi incumbent Mahyeldi”

*Ilham Aldelano Azre*



# ANDRE ROSIADE INGIN GANTI GUBERNUR DI PILGUB SUMBAR

**Kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 di Sumatera Barat menciptakan nama Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade digadang-gadang bakal maju sebagai Calon Gubernur (Cagub).**

**H**anya saja, Andre sendiri enggan berspekulasi dan lebih memilih fokus pada upaya memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.

Namun, Andre Rosiade dan Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sumatera Barat, Fadly Amran, sedang menjadi perbincangan serius sebagai calon duet dalam Pilgub Sumbar tahun 2024.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa kedua tokoh ini adalah kombinasi yang sangat potensial untuk memimpin pembangunan Sumbar ke depan. Hal ini diperkuat oleh rekam jejak mereka yang sangat baik dalam dunia politik.

Andre Rosiade adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2019-2024, sementara Fadly Amran baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wali Kota Padang Panjang pada tahun 2018 dengan banyak prestasi yang berhasil diraih selama kepemimpinannya di “Serambi Mekkah” tersebut.

Menurut pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand), Ilham Aldelano Azre, jika kedua pemimpin muda ini bersatu, mereka memiliki peluang besar untuk menjadi pemenang dalam Pilgub Sumbar tahun 2024 mendatang.

“Jika Andre Rosiade dan Fadly Amran Bersatu, ada peluang besar untuk menjadi pemenang di Pilgub Sumbar 2024 dan bisa menjadi lawan serius bagi incumbent Mahyeldi,” jelasnya.

Keduanya sudah memiliki partai politik, basis massa, dan pendukung yang fanatik. Selain itu, keduanya telah dikenal luas oleh masyarakat.

“Andre Rosiade adalah figur nasional yang memimpin Partai Gerindra di Sumbar, sedangkan Fadly Amran adalah Ketua NasDem Sumatera Barat. Kedua partai ini saat ini memiliki peluang yang baik dalam menghadapi Pemilu 2024,” ungkap Ilham.

Sebelumnya, diketahui Andre Rosiade juga mengungkapkan targetnya untuk melihat perubahan kepemimpinan dalam Pilgub 2024. Menurutnya, partainya harus mencari kandidat

gubernur baru untuk mempercepat pembangunan di Sumatera Barat.

“Kami akan mencari Gubernur Sumbar yang dapat membawa inovasi baru, perubahan yang lebih baik lagi. Kami akan mencalonkan calon gubernur dari pihak kami untuk Pilgub Sumbar nanti,” tegas Andre.

Andre melihat bahwa Sumbar saat ini memerlukan perubahan yang lebih positif. Diperlukan seorang pemimpin yang dapat bekerja sama dengan kepala daerah lainnya secara lebih efektif.

Ia menilai bahwa kepemimpinan saat ini di bawah Mahyeldi, Gubernur Sumbar, belum cukup efisien dalam membangun sinergi antara kabupaten, kota, dan pemerintah pusat.

Andre juga mencatat bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, selalu mendorong semua anggota dan kader partai untuk bekerja keras demi kepentingan masyarakat.

“Kami, sebagai anggota dewan, mendapatkan instruksi dari Pak Prabowo untuk bekerja keras demi kepentingan masyarakat. Kami juga akan terus berkolaborasi dengan semua kepala daerah. Yang pasti, target kami pada Pilgub Sumbar nanti adalah mengganti gubernur,” tambahnya.

Namun terkait pencalonan dirinya sebagai Gubernur Sumbar 2024, Andre enggan berspekulasi dan lebih memilih fokus pada upaya memenangkan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.

“Saya enggan untuk berspekulasi. Sebagai kader Partai Gerindra, fokus utama kami saat ini adalah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Tugas kami adalah memenangkan Pak Prabowo,” ujar Andre Rosiade.

Andre Rosiade, yang juga ang-

gota Komisi VI DPR, berpendapat bahwa apabila Prabowo menjadi Presiden maka isu keterbelakangan pembangunan di Sumbar juga akan dapat diselesaikan dengan lebih baik.

Ia memberikan contoh bahwa jika Prabowo menjadi Presiden dan dirinya menjadi Gubernur, kolaborasi dan komunikasi antara keduanya akan menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya akan mempercepat proses pembangunan.

“Pak Prabowo menjadi Presiden akan membuka peluang komunikasi yang lebih efektif,” ungkap Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Andre juga menyatakan jika Presiden adalah Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan, maka konteks seperti itu tidak akan terjadi.

Andre meyakini bahwa Prabowo akan dengan mudah mendukung usulan semacam ini. Bahkan, ada kemungkinan bahwa Prabowo akan menghubungi beberapa menteri untuk mendukung rencana pembangunan di Sumbar.

Lebih lanjut, sebagai juru bicara Partai Gerindra, Andre mengungkapkan bahwa banyak masyarakat di Sumbar yang mengharapkan dirinya maju sebagai calon Gubernur dalam Pilkada 2024.

Masyarakat telah mengamati kinerjanya yang baik selama menjabat sebagai anggota Dewan DPR RI, sehingga dianggap layak untuk memimpin di Sumbar.

“Kami merasa tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, harapan masyarakat pada tahun 2024, kami membutuhkan pemimpin baru yang mampu membangun Sumbar. Salah satu tokoh yang diharapkan oleh masyarakat adalah Andre Rosiade,” tutur Andre dengan yakin.

Dia juga mengumumkan tujuan ambisinya untuk meraih pergantian gubernur dalam kontestasi Pemilu 2024. Ia berpendapat bahwa partainya harus mencari sosok gubernur baru agar pembangunan di Sumbar dapat berjalan lebih lancar.

Menurut pandangan Andre, saat ini Sumbar memerlukan perubahan positif. Diperlukan pemimpin baru yang memiliki kemampuan lebih baik dalam bekerja sama dengan seluruh kepala daerah di wilayah tersebut.

Andre mengkritik kepemimpinan Mahyeldi, gubernur saat ini, dengan menyebut bahwa pemerintah provinsi belum mampu membangun sinergi yang memadai antara kepala daerah tingkat kabupaten dan kota serta dengan pemerintah pusat. • IRY







“Iya jadi memang setelah selesai proses pembahasan capres dan cawapres ini, kemarin disampaikan Pak Ridwan Kamil disiapkan cagub DKI atau cagub Jabar”

*MQ Iswara*

# PERSIMPANGAN RIDWAN KAMIL, PILGUB DKI JAKARTA ATAU JABAR?

**Setelah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil tidak jadi diusung sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Partai Golkar telah menyiapkan opsi lain.**

**S**ekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil akan menjadi kandidat calon Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Barat dalam Pilkada 2024 mendatang.

Iswara mengatakan, setelah pembahasan Capres dan Cawapres selesai, Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil akan disiapkan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta atau Jabar.

“Iya jadi memang setelah selesai proses pembahasan capres dan cawapres ini, kemarin disampaikan Pak Ridwan Kamil disiapkan cagub DKI atau cagub Jabar,” katanya.

Dijelaskan oleh Iswara, dua opsi tersebut sudah dibahas bersama DPP Partai Golkar. Jika Ridwan memilih maju dalam Pilkada DKI Jakarta, maka Golkar Jabar akan menyiapkan kader lain untuk berkontestasi dalam Pilkada Jabar 2024, dan sebaliknya.

“Pilihan itu diserahkan kepada beliau. Kita belum tahu (apakah RK akan memilih yang mana). Kita serahkan ke beliau lah,” kata Iswara.

Iswara menjelaskan bahwa pembahasan mengenai calon kepala daerah akan dilakukan setelah Pileg dan Pilpres 2024 selesai. Saat ini, Golkar masih fokus pada upaya kemenangan dalam Pileg dan Pilpres 2024.

“Seperti biasa, nanti ada pemb...”

hasan dan beberapa calon akan mendapatkan surat tugas. Setelah itu, setiap daerah akan menerima SK. Tapi pembahasan ini akan dilakukan setelah selesai Pilpres dan Pileg,” ungkapnya.

Sebelumnya Ridwan Kamil menjadi sorotan sebagai Cawapres bersama Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Namun, Ridwan Kamil tidak terpilih sebagai calon wakil presiden, dan Mahfud MD menjadi cawapres pendamping Ganjar. Ridwan Kamil juga tidak terpilih sebagai cawapres pendamping Prabowo, yang kemudian jatuh kepada Gibran Rakabuming.

Partai Golkar saat ini telah menyatakan dukungannya untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Pasangan ini juga mendapatkan dukungan dari koalisi Gerindra, PAN, Demokrat, PBB, Garuda, dan Gelora.

Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Firman Manan, memiliki pandangan bahwa Ridwan Kamil seharusnya

mempertimbangkan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta setelah tidak terpilih sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Firman berpendapat bahwa karakteristik dan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Ridwan Kamil, yang merupakan suami dari Atalia Praratya, lebih sesuai untuk diaplikasikan di ibu kota Indonesia daripada dalam periode kedua di Jabar.

“Jadi opsi untuk RK itu kan tinggal di level pemilihan gubernur. Nah, apakah akan di Jawa Barat untuk dua periode yang kalau sejauh ini memang lebih manageable untuk dimenangkan atau Pilgub DKI,” ucap Firman.

Menurut Firman, meskipun Ridwan Kamil memilih untuk maju dalam Pilgub Jabar untuk periode kedua, kemenangan tidak bisa dijamin begitu saja. Hal ini disebabkan oleh persaingan

yang harus tetap dipertimbangkan dengan calon lawan dalam Pilgub Jabar nantinya.

“Ya kalau medan pertarungan yang lebih sudah teridentifikasi, ya di Jawa Barat. Walaupun tidak ada jaminannya, saya tidak

mengatakan Jawa Barat itu mudah untuk dimenangkan, tapi tentu RK sudah lebih bisa lebih mengidentifikasi, memetakan di Jawa Barat,” bebernya.

Mengingat gaya kepemimpinan dan kemampuan Ridwan Kamil di bidang arsitektur, Firman mengungkapkan bahwa mantan Wali Kota Bandung ini lebih cocok untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta daripada di Jawa Barat.

Diakuinya, Ridwan Kamil mempunyai karakter untuk jadi pemimpin perkotaan dan otoritasnya lebih besar.

“Tetapi kalau kita bicara passion-nya Kang Emil sebagai yang punya karakter pemimpin perkotaan dan kewenangannya relatif lebih luas yaitu di Pilgub DKI. Otoritasnya juga lebih besar dibandingkan dengan gubernur Jawa Barat,” terangnya.

Berbeda dengan pengamat politik dan kebijakan publik dari Yayasan Vinus, Yusuftriadi menyatakan, Ridwan Kamil merupakan tokoh paling populer di Jabar.

Dia menyebut, saat ini belum ada tokoh yang menyaingi popularitas Ridwan di Provinsi Jabar.

Bahkan dilihat dari beberapa hasil survey, Ridwan Kamil masih menjadi tokoh dengan popularitas yang tinggi di Jabar.

“Dengan situasi ini, idealnya dia memutuskan maju lagi di Pilkada Jabar. Belum ada tokoh yang menyaingi popularitas Ridwan, bahkan Bima Arya (Wali Kota Bogor), belum bisa melampaui Ridwan,” ujar Yusuftriadi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, siapa pun yang ingin melawan Ridwan Kamil di Pilkada Jabar harus membuat perhitungan yang matang. Semua hal harus dipertimbangkan, bila ingin mengalahkan petahana.

“Seperti dukungan partai politik, koalisi, dan elektabilitas di tingkat provinsi,” jelas dia.

Dia juga menambahkan bahwa dalam memilih salah satu dari dua opsi tersebut, Ridwan Kamil harus tetap aktif berperan dan berjuang untuk Partai Golkar, karena dukungan partai akan memainkan peran penting dalam menentukan pencalonan gubernur.

“Kalau memang tujuannya ke Pilgub, RK harus tetap di Golkar. Karena bagaimana pun, Golkar itu di Pileg, nanti di bulan Februari 2024 akan mendapatkan suara relatif signifikan. Saya pikir tidak akan keluar dari 3 atau 4 besar. Dan itu kan modal untuk maju dalam Pilgub,” tandasnya. •IRY





“Konsolidasi infrastruktur partai juga lebih mudah dilakukan jika ketua partai sendiri yang bertarung, daripada mengusung calon dari luar partai”

*Ihsan Hamid*



# SINYAL PETINGGI DEMOKRAT MAJU PILGUB NTB

**Petinggi Partai Politik (Parpol) memiliki keunggulan dibandingkan figur lain dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terutama partai besar.**

Pengamat Politik dari UIN Mataram, Ihsan Hamid mengatakan, ketua parpol memiliki kuasa untuk menggerakkan mesin partai, memberikan modal awal kemenangan. Hal ini memberikan keunggulan bagi mereka dibandingkan dengan calon yang bukan ketua partai.

Dari perspektif partai politik, masuknya ketua partai dalam pilkada dapat berdampak positif pada elektabilitas partai yang mereka pimpin. Terutama jika ketua partai tersebut juga mencalonkan diri.

“Selain itu, konsolidasi infrastruktur partai juga lebih mudah dilakukan jika ketua partai sendiri yang bertarung, daripada mengusung calon dari luar partai,” jelasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB), Indra Jaya Usman, telah mengindikasikan niatnya untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Ihsan juga menyebut Indra Jaya Usman atau yang akrab disapa IJU sebagai politisi muda yang cukup fenomenal. Meskipun demikian, IJU dianggap belum memenuhi syarat untuk maju sebagai calon gubernur (cagub), sehingga kemungkinan terbaiknya adalah sebagai calon wakil gubernur (cawagub).

“Ihsan menilai bahwa IJU perlu memperlihatkan kapasitas dan kapabilitasnya, terutama dalam situasi politik yang masih didominasi oleh kalangan yang lebih berpengalaman,” bebernya.

Selain itu, Ihsan mencatat bahwa IJU saat ini belum memiliki jabatan strategis yang cukup tinggi.

Dengan posisinya sebagai anggota DPRD Lombok Barat, IJU bisa membangun citra sebagai sosok yang siap untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Ihsan juga mengingatkan bahwa situasi politik di daerah akan sangat dinamis, terutama dengan adanya Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang mendahului pemilihan kepala daerah di NTB.

Terkait dengan deklarasi yang dilakukan IJU untuk mengindikasikan niatnya untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

“Untuk apa kami berpartai jika tidak bisa mengusulkan kader sendiri,” kata IJU.

Meskipun fokus pada Pilkada yang

akan diadakan pada November 2024 mendatang, IJU belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai persiapan kandidatnya untuk Pilkada 2024.

Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat saat ini sedang memusatkan perhatian pada Pemilu 2024. Namun, ia memastikan bahwa akan ada kader Partai Demokrat yang akan maju dalam Pilkada NTB nanti.

“Hal ini adalah langkah yang wajar jika seorang ketua partai didorong untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah,” ulasnya.

IJU juga menekankan bahwa

kader partai yang akan diusung harus memiliki loyalitas tinggi agar pengalaman Pemilu 2018 tidak terulang. Ia menegaskan pentingnya pemilihan kepemimpinan yang muncul dari dalam struktur partai politik.

IJU juga secara rutin mengunjungi para guru yang telah mendidik dan mengajarnya selama masa sekolah. IJU menganggap hal ini sangat penting karena ia meyakini bahwa pencapaian dalam karir politiknya tak terlepas dari peran penting para guru dalam membentuk dirinya.

“Kita boleh saja selesai dengan masa sekolah, tetapi belajar, mengabdikan, dan menghormati guru adalah pelajaran

nan seumur hidup. Oleh karena itu, mengabdikan, bersilaturahmi, dan mengunjungi guru adalah cara kita menghormati warisan intelektual mereka yang membentuk kita,” ujar IJU.

Menurut IJU, penghormatan kepada para guru tidak hanya sebatas kata-kata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Ia selalu menjaga hubungan dan mengunjungi para guru yang pernah mengajarnya sejak pendidikan dasar hingga sekolah menengah. Baginya, para guru bukan hanya memberikan pelajaran, tetapi juga wawasan tentang kehidupan.

Karena penghargaan yang mendalam terhadap para guru, IJU aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Ia terlibat dalam berbagai upaya untuk mengevaluasi gaji, tunjangan, dan fasilitas kerja guru, serta memastikan mereka memperoleh hak-hak mereka.

IJU juga menjadi inisiator berbagai advokasi untuk kebijakan pro-pendidikan, termasuk perbaikan sistem pendidikan, pendanaan, akses, dan kualitas pendidikan.

Melalui komunikasi intensif dengan para guru, IJU telah memahami permasalahan pendidikan dengan lebih baik, dan ia berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan.

IJU telah menyiapkan sejumlah program dan berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk dunia pendidikan.

IJU mengakui bahwa apa pun yang ia lakukan tak akan pernah sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan oleh para guru.

“Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda untuk terus menghormati, berbakti, dan mengabdikan kepada para guru, karena mereka adalah cahaya yang terus menerangi jalan kita,” tambahnya.

IJU yang pertama kali terpilih menjadi anggota DPRD Lombok Barat pada pemilu 2009, memiliki rekam jejak sebagai pegawai negeri yang tak kenal lelah.

Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lombok Barat sejak 2009, IJU telah memberikan keteladanan. Dedikasi dan komitmennya terhadap masyarakat tercermin dalam berbagai proyek dan program yang dijalkannya.

“Ketika dititipi rakyat, saya sadar bahwa saya bukan sekadar wakil mereka di legislatif, tapi juga rekan dan pembela setia mereka,” imbuhnya.

Sebelum terjun ke dunia politik, IJU aktif mengadvokasi keprihatinan masyarakat yang tulus di beberapa lembaga swadaya masyarakat, antara lain Lembaga Kajian Krisis dan Perdamaian (InSKRIP) NTB, Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LAD), dan Gerakan Pemuda Ansor, serta selaku Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat. • IRY







“Kedudukan Al Haris sebagai Gubernur memberinya keunggulan tersendiri, tetapi persaingannya dengan Romi pasti akan memanas”

Bakri

# INFO PILKADA

Minggu IV • Oktober 2023

11

## MENANTI PRIORITAS STRATEGIS PAN DI JAMBI

**Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi 2024 sebentar lagi menjadi medan pertempuran antara dua tokoh kader PAN yang sangat menonjol antara Romi Haryanto dan Al Haris.**

Romi Haryanto merupakan Bupati Tanjung Jabung Timur dan Al Haris menjabat sebagai Gubernur Jambi, keduanya tidak hanya bersaing untuk memperebutkan kursi pemerintahan, tetapi juga berjuang keras untuk memenangkan dukungan dari partai dengan lambang matahari ini.

Romi Haryanto, didorong dengan keyakinan yang kuat oleh Ketua DPD PAN Kota Jambi, Rusli Kamal Siregar, nampaknya memulai pertarungan ini dengan berbekal momentum yang cukup solid.

“Romi adalah kader PAN murni,” katanya.

Rusli Kamal seakan-akan menggarisbawahi bahwa Romi adalah kader tulen PAN yang pantas mendapatkan dukungan penuh dari partai ini.

Namun, Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Bakri, memberikan tanggapan yang sangat tegas. Baginya, dukungan yang dinyatakan oleh Rusli Kamal Siregar hanyalah pendapat pribadi, dan PAN masih berfokus pada Pilpres dan Pileg. Saat itu, belum ada pembicaraan resmi mengenai Pilgub Jambi 2024.

Sebenarnya, Romi Haryanto bukanlah satu-satunya kader PAN yang bersinar di Jambi. Al Haris, yang menjabat sebagai Gubernur, juga merupakan bagian dari PAN dan diharapkan akan ambil bagian dalam persaingan untuk Pilgub berikutnya.

“Kedudukan Al Haris sebagai Gubernur memberinya keunggulan tersendiri, tetapi persaingannya dengan Romi pasti akan memanas,” jelasnya.

Momentum menarik ini mencerminkan dinamika internal PAN yang sedang berlangsung. Bagaimana partai ini akan membuat keputusan, apakah akan mendukung kader lama yang sudah berkuasa atau memberikan kesempatan pada tokoh baru, menjadi pertanyaan yang sedang hangat dibicarakan di kalangan publik.

Pertarungan antara Romi dan Al Haris dalam Pilgub Jambi 2024 tidak sekadar menentukan

siapa yang akan memimpin Jambi, melainkan juga berkaitan dengan strategi PAN di tengah tantangan kompleks dalam dinamika demokrasi.

Tantangan utama bagi PAN adalah bagaimana memanfaatkan peluang di Pilgub tanpa memecah partai. Jika keduanya maju tanpa konsolidasi dukungan, PAN berisiko memecah suara pemilih dan melemahkan posisi mereka.

Dinamika Pilgub Jambi dapat menjadi indikator tentang bagaimana PAN akan berperilaku dalam kontestasi politik nasional.

Keputusan PAN di Jambi dapat mencerminkan prioritas strategis mereka, apakah mereka akan mendukung kader yang sudah mapan atau memberi peluang kepada figur baru untuk pertumbuhan dan regenerasi partai.

Sementara Barisan Merah Putih (BM) PAN Kota Jambi dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto, untuk maju sebagai Cagub Jambi pada Pilgub 2024 mendatang.

Ketua BM PAN Kota Jambi, Teuku Gilang, menegaskan bahwa partainya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar barisan dan nilai-nilai dasar perjuangan partai dalam menentukan calon pemimpin.

“Dalam menilai calon pemimpin, sangat penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai kepentingan dan ideologi partai,” ulasnya.

Gilang menjelaskan bahwa Romi Haryanto adalah contoh yang ideal dalam

perkaderan partai, sebab beliau lahir dari kelompok BM PAN dan kemudian bergabung dengan PAN.

Dia percaya bahwa nilai-nilai perjuangan partai akan selalu melekat pada sosok Romi Haryanto, mengingat perjalanan politiknya yang dimulai dari BM PAN dan berlanjut di PAN.

“Saya yakin bahwa Romi Haryanto adalah calon pemimpin yang memahami dan menerapkan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai perjuangan partai,” tambahnya.

Saat ini Romi Haryanto sedang aktif dalam menjalani rangkaian kunjungan ke berbagai daerah di Provinsi Jambi, seperti Bungo, Merangin, dan Kerinci.

Dalam upayanya untuk membangun jejaring politik yang kuat, Romi juga kerap kali terlihat bertemu dengan berbagai tokoh terkemuka, termasuk Mashuri, Adirozal, dan sejumlah tokoh politik lainnya di wilayah barat Jambi.

Dari semua tokoh yang ditemuinya di wilayah barat Jambi, Romi tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mashuri, Ketua DPD Demokrat Jambi.

Kedekatan ini terlihat dari frekuensi kunjungan mereka satu sama lain, baik di Bungo maupun di Tanjung Jabung Timur. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, Mashuri tampaknya telah mendapat sambutan yang

hangat dari Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur.

“Kemungkinan timur dan barat,” ujar Romi singkat

Hubungan erat antara Romi dan Mashuri ini menimbulkan spekulasi mengenai apakah mereka akan berpasangan dalam Pilgub yang akan datang pada tahun 2024.

Ketika ditanya tentang kemungkinan ini, Romi, seorang politisi PAN, tidak menampik kemungkinan kolaborasi antara mereka, mengatakan bahwa kemungkinan timur dan barat bisa menjadi pasangan yang kuat untuk Pilgub mendatang.

Romi dan Mashuri disebut cocok sebagai pasangan karena mereka mewakili wilayah timur dan barat Jambi, dan dalam hal usia, mereka juga memiliki perbedaan yang dapat memberikan keuntungan tambahan.

“Jika itu adalah yang terbaik untuk daerah mereka, mengapa tidak,” tambahnya.

Selain kunjungan ke Bungo, Romi juga secara aktif bertemu dengan Bupati Kerinci, Adirozal, untuk membahas langkah-langkah bersama dalam memajukan provinsi Jambi ke depan.

Selain menjalani peninjauan untuk mencari calon wakil gubernur yang sesuai, Romi juga menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik, termasuk Partai Golkar.

Ia terlihat bertemu dengan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Romi Haryanto di Tanjung Jabung Timur.

Kedua tokoh politik ini menunjukkan kesatuan dalam tekad mereka untuk mendorong kemajuan Jambi yang lebih baik lagi. • IRY





“Kita hilangkan dulu perasaan kita sebagai orang tua yang tidak percaya pada anak muda. Jadi ada kebiasaan, ah masih kecil kau. Namun kita tidak tahu kemampuan dia sekarang sudah jauh lebih hebat dari kita”



*Herlan Asfiudin Assaaf*

# SIAPKAN PROGRAM UNGGULAN SESUAI BIDANGNYA

**Pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024 tinggal hitungan bulan. Para calon anggota legislatif (Caleg) yang ikut dalam kontestasi politik akan berusaha semaksimal mungkin memikat hati rakyat lewat berbagai program yang mereka miliki. Goals-nya adalah mendapat suara rakyat dan duduk di parlemen.**

**B**iasanya, para Caleg memiliki background atau latar belakang tersendiri untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kepentingan sektor pariwisata di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi salah satu fokus dan perhatian Herlan Asfiudin Assaaf ketika memutuskan maju menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Gerindra Dapil Palembang 2.

Herlan atau Babe --panggilan akrabnya, sudah tidak asing dalam dunia kepariwisataan Sumsel. Semua orang yang berkecimpung dalam industri ini mengenalnya. Sesuai dengan latar belakang Herlan, keputusannya maju di Pileg 2024 ini ingin mengembangkan industri pariwisata yang memiliki implikasi besar terhadap berbagai sektor.

“Keputusan maju di Pileg 2024 karena tekad ingin menyuarakan kepentingan sektor pariwisata di Sumsel yang selama ini Babe kerjakan bersama-sama pentahelix pariwisata,” ujar pria kelahiran Prabumulih, 27 September 1961 ini.

Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Sumsel periode 2011 - 2021 ini mengatakan, dunia pariwisata tidak hanya bicara soal tempat rekreasi saja. Lebih luas lagi adalah soal perekonomian masyarakat yang akan bertumbuh karena tamu-tamu datang ke daerah tujuan wisata tersebut.

Beberapa sektor yang akan terkena imbasnya adalah usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dengan berbagai kategori, tempat penginapan dan homestay, bisnis transportasi dan sebagainya.

“Dan dari semua itu, akan tercipta lapangan pekerjaan, ekonomi akan tumbuh dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat,” jelas Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sumsel ini.

Menurutnya, dengan niat baik dalam pencalegan pria berusia 62 tahun ini, dirinya sangat optimis mampu bersaing dengan kandidat-kandidat lain saat Pileg 2024 digelar.

“Semua Caleg bergerak dan tentunya kita akan membawa spesifik keahlian masing-masing. Semua Caleg pasti sudah memiliki segmen pasar masing-masing pula,” jelas Herlan.

Optimisme itu, lanjutnya, karena sektor pariwisata yang dibinanya sudah ditunjang dengan SDM (sumber daya manusia) mumpuni.

“Mereka tidak mengharapkan uang politik, tapi lebih mementingkan investasi di sektor pariwisata karena peran saya selama ini sudah membuktikan bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder. Baik ketika saya sebagai pengusaha maupun saat menjadi bagian dari pemerintahan,” ungkap Staf Khusus Walikota Palembang bidang Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif ini.

Herlan yang juga pernah menjadi tenaga khusus Gubernur Sumsel Bidang Pariwisata pada 2021 ini menilai, setiap Caleg memiliki strategi masing-masing untuk menggaet sebanyak-banyak pemilih. Namun, Pileg ini tidak sama seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Jadi, asal sudah terpenuhi angka BPP (Bilangan Pem-

bagi Pemilihan), sudah cukup. Tidak seperti Pilkada yang harus mengambil sebanyak-banyaknya suara pemilih,” ungkapnya.

Dalam keikutsertaannya di Pileg kali ini, Herlan mengaku sudah menyiapkan cost politic. Meski tak ingin menyebut nilai, cost politic yang disiapkan bukan untuk money politic, melainkan untuk sosialisasi, kegiatan dan lain-lain.

“Untuk money politic kita tidak akan melakukannya karena itu termasuk sogok menyogok. Jangan melakukan tindakan curang untuk merebut hati pemilih,” bebernya.

## Beri Kesempatan untuk Prabowo dan Gibran

Sebagai kader Partai Gerindra dan pribadi, Babe sangat mendukung sosok pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Meski banyak yang menyangsikan kemampuan Gibran namun dia melihat potensi besar dari putra sulung Presiden Jokowi tersebut.

“Jadi kapan lagi kita memberi ruang kepada anak muda. Gibran itu salah satu yang terbaik bukan satu satunya. Malah banyak bupati dan walikota yang lebih muda, ada Bupati Kediri. Ada Panca sebagai Bupati Ogan Ilir yang umurnya baru 31 tahun. Gibran itu sudah 37 tahun, bukan anak muda bener,”

tegas Babe.

Dikatakan Babe Herlan, sudah saatnya memberikan kesempatan dan peluang Gibran Rakabuming untuk memimpin Indonesia bersama Capres Prabowo Subianto.

“Kita hilangkan dulu perasaan kita sebagai orang tua yang tidak percaya pada anak muda. Jadi ada kebiasaan, ah masih kecil kau. Namun kita tidak tahu kemampuan dia sekarang sudah jauh lebih hebat dari kita,” ucapnya.

Untuk itu dia meminta agar pendapat yang merendahkan kaum muda untuk dihilangkan karena sebetulnya ada potensi besar dari mereka. Selain itu nasib untuk menjadi seorang presiden bukan hanya sekedar usaha manusia saja tapi juga berkat campur tangan Tuhan.

Sehingga kalau memang jadi, yah jadilah Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. “Semua sudah dituliskan, kita saja yang tidak tahu. Begitu juga saya,” ucapnya.

Soal dukungan keluarga, Herlan mengaku mendapat full support. Bahkan, dirinya sudah menyatakan komitmen dan perjanjian bahwa keikutsertaannya dalam Pileg hanya dilakukan 2024 saja.

Sulaiha, Ketua APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia) Sumsel yang dimintai komentar mengharapkan, kehadiran Babe Herlan di parlemen akan mewakili para pelaku usaha dalam menyampaikan aspirasi demi perkembangan pariwisata.

Dukungan kepada Herlan juga disampaikan Bunda Rayya, Ketua Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner (ASPENKU) Sumsel. Menurutnya, pengembangan UMKM khususnya di bidang makanan dan minuman diharapkan dapat terwakili oleh keberadaan Herlan di Parlemen.

Anton Wahyudi, Ketua ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel) Sumsel juga mengungkapkan hal serupa. Dengan majunya Herlan di Pileg nanti, ada harapan bahwa pariwisata Sumsel akan lebih baik.

Hj Rohana Ketua PPKN (Pedagang dan Pecinta Kuliner Nusantara) Sumsel mengaku, kehadiran Herlan di parlemen sangat positif bagi kemajuan pariwisata Sumsel.

“Babe sudah tahu dan paham apa yang mesti dilakukan untuk Pariwisata di Sumsel apalagi Babe sebagai Ketua Masata (Masyarakat Sadar Pariwisata) Sumsel,” tambahnya.

Nur Anita Alwi Rais, Ketua PPUMI (Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia) Sumsel dan Owner Pempek Gending menyebut, pencalegan Herlan merupakan semangat untuk kemajuan pariwisata Sumsel.

“Babe orangnya semangat, berpandangan luas ke depan, semoga terpilih ya Babe agar kemajuan pariwisata Sumsel semakin baik,” imbuhnya. ●RDR







“Kami sangat mendukung atas strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dengan menggandeng sosok Gibran untuk bertarung memperebutkan kursi sebagai orang nomor 1 di Indonesia”

Fitriana

# DUKUNG PENUH PRABOWO-GIBRAN

**Masuknya nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Prabowo Subianto mendapat apresiasi yang luar biasa dari partai pendukung dan para relawan. Meski ada beberapa calon lain yang dianggap sama hebatnya namun sosok Gibran Rakabuming menjadi orang yang paling pas mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.**

Selain didukung penuh partai politik koalisi, pasangan Prabowo dan Gibran juga mendapat dukungan total dari berbagai relawan. Ada banyak barisan relawan serta organisasi sayap yang tergabung di tim kemenangan Prabowo - Gibran ini. Salah satunya datang dari Rumah Kemenangan Prabowo Subianto (Rampas).

Guna memenangkan pasangan Prabowo - Gibran ini, Rampas melakukan gerak cepat dengan membentuk organisasi di seluruh Indonesia.

Bukan itu saja Rampas yang dipimpin Ketua Umum Tengku Helmi ini juga ikut turun langsung bersama seluruh simpatisan. Bahkan militansi dari para anggotanya banyak mendapat pujian. Hal ini juga yang dirasakan Fitriana SH selaku bendahara umum Rampas.

“Organisasi ini sebetulnya sudah lama terbentuk, dan kebetulan saya dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Bendahara Umum di Rampas ini. Saya dilantik pada tanggal 21 Oktober 2023,” terang Fitriana yang biasa disapa Pingky.

Pingky menjelaskan, Rampas adalah organisasi dan bukan relawan namun mereka merupakan tim kemenangan Prabowo Subianto untuk melenggang menuju RI 1.

Rampas sendiri ujar pengusaha ini merupakan organisasi tim kemenangan di luar area relawan. Sehingga peran dan fungsinya sangat besar dalam mendukung pergerakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Atas peran dan jabatan yang disandangnya ini, Pingky yang juga kader partai pendukung koalisi Prabowo Subianto kini sedang fokus pada tugasnya sekarang. Dimana Rampas menjadi salah satu elemen penting dalam kesuksesan Prabowo Subianto dan Gibran di Pilpres 2024 ini.

Pingky menilai keputusan Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming adalah tepat. Sebagai bentuk dukungan tersebut mereka tentu akan bekerja maksimal agar tujuan tercapai.

“Artinya kami sangat mendukung atas strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dengan menggandeng sosok Gibran untuk bertarung memperebutkan kursi sebagai

orang nomor 1 di Indonesiaini,” jelas mantan model ini.

Sementara secara organisasi lanjutnya, Rampas sangat setuju dengan sosok Gibran Rakabuming. Hal itu juga menunjukkan kalau Prabowo dan Joko Widodo berada dalam satu tujuan dalam membangun Indonesia yang lebih maju lagi.

“Siapa pun yang mendampingi bapak Prabowo kami akan tetap mendukung karena kami juga melihat dan mengamati sosok Gibran termasuk salah satu kandidat yang terbaik juga, terutama untuk menjaring suara dari kalangan anak muda,” tegasnya.

Dikatakan Pingky, di Pemilu 2024 ini memilih dari kalangan milenial cukup tinggi, di atas 50 persen. Potensi ini perlu digarap maksimal, salah satunya dengan menunjukkan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres dari kalangan anak muda.

“Sekarang inikan zaman milenial dan memang diharuskan yang muda agar bangkit dan tidak hanya berdiam diri saja. Prabowo memilih sosok Gibran sendiri menurut saya merupakan sosok yang berpengaruh dan tidak dapat dipandang sebelah mata,” jelasnya.

“Sekarang yang muda yang harus bangkit dan membuktikan kepada dunia bahwa anak muda bisa berkarya dan bisa meneruskan cita-cita bangsa. Bukan zamannya lagi bahwa pemuda harus dibelakang sekarang pemuda harus menjadi garda terdepan untuk meneruskan cita-cita para pendahulu kita,” tambah dia.

Menurut Pingky, sosok Gibran sendiri merupakan Walikota Solo dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi Presiden Indonesia dimasa datang. Meski terbilang muda namun Gibran, sudah melewati masa-masa dunia politik baik dari Internal maupun non internal. Sehingga dia juga terbiasa dalam menghadapi tekanan-tekanan politik.

“Sebagai kader Partai Bulan Bintang, kami diinstruksikan untuk mensupport pasangan Prabowo-Gibran,” tegasnya.

Meski mendapat tugas besar sebagai Bendahara Umum Rampas namun

sebagai kader Partai Bulan Bintang yang mencalonkan diri dari Dapil Sumsel 1 Palembang A yakni Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Gandus, Kertapati, Seberang Ulu 1, Jakabaring, Seberang Ulu 2, dan Kecamatan Plaju juga tidak lupa pada tugasnya.

“Kami sebagai kader Partai PBB diinstruksikan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra untuk selalu mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Gibran. Namun kami juga tetap fokus pada pen-

calegan,” terangnya.

Sebagai kader partai dan pendukung Prabowo Subianto dan Gibran, Pingky berpendapat, agar lebih dikenal masyarakat khususnya di Sumsel, pasangan ini harus meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan serta membangkitkan geliat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk kaum perempuan.

“Jika program tersebut dijalankan kami sangat yakin pasangan Prabowo-Gibran akan mampu menjadi pemenang pada kontestasi pemilu mendatang. Untuk sosok Prabowo, Sumsel ini merupakan daerah kemenangan terbukti pada Pemilu yang lalu mampu meraup suara hingga 60 persen,” jelasnya.

Kesuksesan itu tentu akan mereka ulangi lagi di Pemilu dan Pilpres 2024 ini. Bahkan mereka yakin Prabowo akan menang lebih besar lagi karena selain didukung banyak partai, pasangan ini juga disokong para relawan dan simpatisan militan seperti Rampas dan lainnya.

“Harapan saya pasangan Prabowo-Gibran dapat memenangkan suara di Sumsel lebih dari sebelumnya. Kita tidak mendahului kehendak Allah karena kami yakin Prabowo-Gibran mampu bangkit dan memenangkan Pemilu di Sumsel dan seluruh wilayah Indonesia,” ujar Pingky.

Untuk mencapai kemenangan besar itu, Rampas dan kader Partai Bulan Bintang (PBB) akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga target mereka akan tercapai.

“Tujuan kami saat ini yakni fokus pada kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Itu dulu,” terangnya. ●RDR





“Jadi harus kita ingatkan untuk pencegahannya karena kalau langsung ditindak nanti mereka beralibi dengan mengatakan tidak tahu”

**Kurniawan**



# KPU DAN BAWASLU DAERAH MULAI PANASKAN MESIN

**Memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang paling sibuk dan menjadi sorotan. Namun hal ini tidak terjadi di lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) daerah karena mereka memang tidak dilibatkan secara langsung.**

**M**eski demikian, KPUD dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah juga mulai memanaskan mesinnya sebagai pertanda memasuki tahapan pesta demokrasi. Secara umum hingga saat ini kondisi KPUD dan Bawaslu masing dalam kondisi baik-baik saja. Tidak ada aktivitas ramai seperti di kantor pusat mereka.

Selanjutnya KPU juga akan memberikan ruang perbaikan berkas dan waktunya telah ditentukan dan batas akhirnya adalah sampai 13 November 2023 untuk penetapan calon presiden dan pada tanggal 14 November adalah tahapan pengundian nomor urut. Dimana untuk tahapan tersebut KPU RI yang melaksanakan.

“Untuk KPU Sumsel kewenangannya hanya di tingkat penetapan daftar calon DPRD Provinsi, jadi kalau ditanya soal persiapan KPU Sumsel sendiri tidak terlibat dalam proses pendaftaran, jadi KPU Sumsel sifatnya mensupport saja dengan kegiatan pimpinan kami di KPU RI,” terang Amrah Muslimin, Ketua KPUD Sumsel.

Kewenangan KPU sendiri lanjutnya, hanya membuka dan menerima pendaftaran. Kemudian memproses administrasi untuk selanjutnya menetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Mengenai siapa yang akan mendampingi calon Presiden, kewenangan tersebut 100 persen adalah kewenangan partai politik yang mengusung pasangan calon.

Di Pilpres ini, KPUD akan mulai sibuk saat memasuki tahapan kampanye pada tanggal 28 November. Dimana setiap parpol pengusung wajib melaporkan kegiatannya serta para

relawan pendukung ke KPUD.

“KPUD Sumsel akan menyiapkan jadwal kampanye tentu tetap mengacu pada jadwal yang sudah dibuat dari KPU RI. Selanjutnya kami akan membentuk zona kampanye. Pembentukan zona kampanye ini penting untuk menghindari bentrokan peserta Pemilu,” terang mantan Ketua KPUD Kabupaten Ogan Ilir (OI) ini.

KPUD Sumsel akan bergerak total mulai November atau saat pelaksanaan kampanye Pilpres. Sementara untuk saat ini mereka belum melakukan kegiatan apapun.

Sehingga saat melihat banyaknya poster-poster bacaleg, calon presiden dan lainnya, KPUD Sumsel dan Bawaslu tidak bisa melakukan tindakan apapun.

“Untuk diketahui masyarakat saat ini kita belum memasuki tahapan kampanye untuk peserta Pemilu. Pemberlakuan masa kampanye saat memasuki tahapan pendaftaran dan penetapan daftar calon tetap sebagai peserta Pemilu.

Kalau sekarang mereka bukan sebagai peserta pemilu atau caleg tapi statusnya bakal calon saja,” terang Amrah.

Sehingga untuk melakukan penertiban ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Banyaknya spanduk dan

gambar di pohon dan tiang yang ada di pinggir jalan harusnya ditertibkan polisi pamong praja (Pol PP) sesuai aturan daerah.

Namun KPUD Sumsel juga menyayangkan sikap dari partai politik yang terkesan membiarkan banyaknya gambar bacaleg bertebaran di jalan-jalan. Seharusnya para Parpol juga memberikan pendidikan politik kepada kadernya, termasuk menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat.

“Pendidikan politik itu bukan hanya pembelajaran tentang berpolitik dan cara berkampanye saja tapi juga mengedukasi masyarakat tentang tindak tanduk para kader,” tegas Amrah.

Sama dengan KPUD, Bawaslu Sumsel juga belum melakukan banyak kegiatan karena saat ini belum memasuki tahapan kampanye. Meski demikian mereka juga siap memanaskan mesin dengan melakukan banyak koordinasi ke berbagai pihak.

“Nantinya kita juga akan mengundang partai politik karena mereka adalah bagian dari yang mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Kita akan jelaskan apa yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Termasuk nanti prosedurnya seperti apa,” jelas Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan.

Dalam melakukan kegiatan pengawasan ini lanjut Kurniawan, Bawaslu juga akan menggandeng pihak kepolisian, pemerintah daerah sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu.

“Untuk tahap awal ini kita hanya memberikan himbauan dan sosialisasi. Seperti terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya, tidak boleh seseorang yang berstatus ASN untuk turun langsung ke

ranah politik. Sebab tidak menutup kemungkinan ada ASN yang menjadi panitia untuk kegiatan partai,” terang dia.

Selama ini sering ada ASN ikut-ikutan kampanye di rapat umum karena memang membutuhkan massa yang banyak. Sehingga ASN diperingatkan untuk tidak terlibat di politik. Meski ASN mempunyai hak pilih tapi tidak boleh ikut terlibat dalam kampanye dan dalam bentuk apapun, termasuk di media sosial.

Bahkan untuk ASN jangankan untuk memposting men Tag salah satu pasangan Presiden, Caleg atau peserta Pilkada saja tidak boleh apalagi ada bentuk simbol-simbol ajakan.

“Jadi harus kita ingatkan untuk pencegahannya karena kalau langsung ditindak nanti mereka beralibi dengan mengatakan tidak tahu,” jelasnya.

**Menghilangkan Kebiasaan**

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia juga dikenal sebagai pesta demokrasi yang panjang dan berliku. Hal itu juga membuat biaya menjadi besar. Besarnya biaya politik baik di tingkatan Pilpres, Pilkada dan Pileg menjadikan Pemilu di Indonesia cenderung transaksional.

Hal ini juga disadari benar oleh KPUD dan Bawaslu Sumsel, bahkan politik transaksional ini sudah mulai dianggap biasa karena sama-sama membutuhkan. Padahal dampak dari money politic ini sangat besar karena bisa menentukan kualitas baik buruknya orang-orang di legislatif nanti.

“Sekarang mindset di masyarakat politik uang itu sah dan merupakan sebuah rutinitas maka muncul istilah Wani Piro, ambil uangnya jangan pilih calegnya. Artinya itu mengesahkan dan menormalkan money politic. Sedangkan ketika ada calon yang tiba-tiba ingin mengubah mindset itu tidak mungkin, jadi satu-satu yang harus dipahami adalah memberikan literasi yang benar dan ini berproses panjang,” ungkap Ketua KPUD Sumsel, Amrah Muslimin.

Amrah bahkan tidak bisa menjamin kalau di Pemilu 2024 ini politik uang akan menghilang. Butuh proses yang panjang dan lama bahkan butuh hingga 20 tahun ke depan.

Meski demikian bukan berarti politik uang di Indonesia tidak bisa dihilangkan. Melalui edukasi yang benar serta kesadaran semua pihak maka politik transaksional bisa ditiadakan meski butuh proses panjang.

“Menurut saya pemilu itu bukan untuk saya dan anak-anak saya namun mungkin untuk generasi Cucu-cucu kita nanti,” tuturnya. ●RDR







“Program apa untuk kaum muda itu harus jelas dan detail. Apakah Gibran benar-benar paham apa keinginan kaum muda? Kalau menurut saya belum ada secara jelas”

**R.A Nur Ashiilah**

# TIDAK SEMUA KAUM MUDA TERWAKILI OLEH GIBRAN

**Usia muda yang disandang Gibran Rakabuming Raka tidak menjadi jaminan kalau putra Presiden Joko Widodo itu juga mewakili kalangan anak muda generasi milenial atau biasa disebut Generasi Z. Sehingga meski berstatus sebagai Cawapres termuda, tidak menjamin Gibran bisa mendulang suara maksimal khususnya di luar Pulau Jawa atau di daerah.**

Beberapa tokoh muda khususnya dari kalangan mahasiswa menilai Gibran Rakabuming Raka bukanlah sosok yang istimewa secara objektif. Statusnya sebagai putra Presiden Jokowi bisa jadi menjadi pertimbangan para elit politik untuk menjadikannya Cawapres mendampingi Prabowo Subianto, prestasi lain mungkin tidak se mentereng tokoh muda lainnya di Indonesia.

Bahkan para mahasiswa menilai, Gibran adalah sosok pemuda yang biasa-biasa saja. Meski menyandang sebagai kepala daerah dan putra presiden namun hal itu belum cukup sebagai modal untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini.

Presiden Mahasiswa (Presma) dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Mohd Azra D Dzaky berujar mereka telah berdiskusi dengan seluruh perwakilan kaum muda di Sumsel. Dari hasil diskusi, kaum muda Sumsel menyatakan Gibran Rakabuming Raka belum bisa dikatakan mewakili kaum muda di Indonesia.

“Saya sudah berdiskusi dan ngobrol kepada semua perwakilan kaum muda apakah Gibran mewakili kita, jawabannya tidak! Dari hasil diskusi kami dia belum mengetahui betul keinginan kaum muda secara jelas. Visi dan misi juga masih terlalu umum tidak ada benar-benar terpapar keinginan kaum muda disana disuarakan oleh Gibran,” kata dia.

Bahkan dia menyebutkan terpolihnya Gibran sebagai Cawapres Prabowo menimbulkan

konflik baru di iklim politik pada Pemilu 2024. Konflik itu menimbulkan munculnya istilah baru yaitu politik sandera.

Politik sandera dinilai ulah dari cawacew Jokowi yang memegang semua Kartu As para pemimpin partai selain awalnya ada politik dinasti meloloskan Gibran melalui gerbong MK. Kartu As itu membuat pemimpin partai mau tidak mau harus bergabung dalam tim Jokowi.

“Jokowi memegang semua kartu As para pemimpin partai tentunya setelah meloloskan Gibran di MK. Contohnya Gerindra Prabowo dengan kasus HAM nya, Golkar Airlangga Hartarto dipanggil ke jagung kasus CPO dan PAN Zulkifli Hasan kasus korupsi impor gula. Alasan itulah, mau tidak mau menuruti Jokowi itulah politik sandera memegang kartu As,” celetuknya

Di sisi lain dia menyikapi kenapa Prabowo mengumumkan memilih Gibran sebagai pendamping di detik-detik terakhir batas berakhirnya pendaftaran Paslon Pilpres 2024, adanya indikasi keputusan MK terkait umur. Hal itu membuat Prabowo ikut mengamankan posisinya bisa maju menjadi Capres.

“Salah satu kartu As Prabowo lainnya adanya keputusan MK terkait batas umur maksimal 70 tahun. Sedangkan Prabowo Subianto berumur 71 tahun

atau 72 tahun. Makanya Prabowo menawarkan posisi dan memilih Gibran dan baru bisa mengumumkan di detik terakhir,” jelasnya lagi.

Presma Unsri ini kedepannya akan melakukan jajak pendapat kembali kepada semua generasi muda di Sumsel.

Dia mengaku tidak akan bisa mematahkan fakta kalau Gibran sudah resmi menjadi Cawapres dan mahasiswa tidak akan melakukan demo selama Pilpres 2024.

Kendati mereka sangat menolak adanya dinasti politik mahasiswa se-Indonesia melakukan demo secara serentak. Kondisi sekarang Ganjar Pranowo telah resmi menjadi Cawapres mahasiswa tidak akan lagi menggelar demo tersebut.

“Kalau kita demo takutnya dinilai melanggar ketetapan yang sudah resmi dan mengganggu jalan demokrasi Pemilu 2024 di Indonesia. Daripada berbahaya karena rentan konflik lebih baik kami lakukan jajak pendapat,” ucap dia.

Jajak pendapat itu meminta kaum muda untuk menyampaikan keinginan mereka kepada tiga Paslon Pilpres 2024. Dari ketiga itu siapa yang menerima usulan serta keinginan kaum muda dia yang kami pilih dan kami nyatakan wakil kaum muda.

Sementara Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang Chandra menyebutkan mengklaim sebagai wakil Generasi Milenial maupun Gen Z yang dilakukan Gibran sah-sah saja. Namun HMI tidak merasa Gibran sebagai wakil kaum muda khususnya di Sumsel.

“Kalau dari segi umur dia benar memang masuk kategori kaum muda, namun tidak bisa juga menjadi wakil kaum muda. Jelas disini menjadi wakil kaum muda bukan hanya karena umur muda dibandingkan Paslon yang lain,” jelasnya.

Dia bahkan menyayangkan kalau Gibran menjadi Cawapres Prabowo Subianto karena terkesan dipaksakan untuk sekedar keinginan berkuasa di Indonesia. HMI menilai Gibran tidak layak menjadi Cawapres apa lagi menjadi wakil kaum muda di Indonesia.

Melihat iklan politik hari ini Chandra berkata politik hanya dipegang oleh orang-orang itu saja. Artinya adanya potret politik konflik Megawati versus Jokowi hanya drama untuk menciptakan manajemen konflik agar pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD diusung PDIP menang di Pemilu 2024.

“Fakta di lapangan semua orang sangat suka dengan Ganjar tetapi tidak dengan PDI-P. Nah kondisi ini sengaja dibuat agar orang suka dengan PDIP. Kalau saya menilai ini hanya manajemen konflik yang dibuat Megawati dan Jokowi. Setelah memasangkan Gibran dengan Prabowo rakyat menilai tidak layak sehingga Prabowo jadi korban dan Ganjar yang menang,” tuturnya.

Untuk Gibran dia berpesan agar jadilah generasi perintis dibandingkan generasi penerus karena prosesnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta saja belum selesai. Gibran pun tidak layak disebut sudah menjadi Walikota karena masih berjalan dan kerjanya belum terlihat.

“Bahkan untuk jadi wakil kaum muda setitik saja Gibran belum berbuat sesuatu kepada kami. Bagaimana bisa menjadi wakil kaum muda bukan hanya umur muda bisa jadi wakil kaum muda,” tegasnya.

Sedangkan Bendahara Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni dan Budaya Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) RA Nur Ashiilah mengatakan, sebagai perwakilan kaum muda Gibran tetap tidak layak menjadi Cawapres dan juga mewakili kaum muda.

“Program apa untuk kaum muda itu harus jelas dan detail. Apakah Gibran benar-benar paham apa keinginan kaum muda? Kalau menurut saya belum ada secara jelas,” ucap mahasiswi Fakultas Ekonomi ini

Menurutnya kaum muda tidak hanya sekarang terfokus kepada dunia multimedia saja, kaum muda yang menempuh pendidikan juga banyak sekali. Jangan hanya melihat kaum muda yang selalu ada di sosial media (sosmed), kaum muda yang hidup di dunia nyata juga banyak membutuhkan pendidikan dan fasilitas lainnya.

“Selain itu dari pengamatan saya Gibran hanya terbakar emosi untuk mencalonkan diri karena keberanian mencalonkan diri juga harus diukur apakah kita sudah mampu,” tuturnya. ●RDR







# PERTARUNGAN KADER PENDUKUNG MEGAWATI DAN JOKOWI

**Suguhan dan drama politik di Pemilu 2024 berbeda jauh dengan sebelumnya. Beberapa manuver-manuver politik terutama di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan para elit politik. Kini pertarungan bukan hanya antara tiga pasangan bakal calon presiden (Bacapres) tapi juga adu gengsi antara kader pendukung Megawati Soekarnoputri dengan Joko Widodo.**

**S**osok Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dalam beberapa periode ini memang dikenal tokoh paling berpengaruh di politik demokrasi Indonesia. Namun di Pemilu 2024 ini, ketokohnya diuji oleh orang dekatnya sendiri, Joko Widodo.

Di sisi lain, koalisi besar dengan poros utama PDIP kini seakan mulai runtuh setelah adanya poros baru yang dikomandoi Prabowo Subianto.

Kekuatan itu makin menjadi dengan masuknya Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi sebagai bacawapres Prabowo Subianto. Padahal Gibran yang merupakan kader PDIP sudah mendapat tugas sebagai juru kampanye untuk pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Persaingan antar elit politik ini juga ikut menjalar ke daerah. Para kader pendukung Megawati tentu akan bertarung keras menghadapi persaingan dengan kader Prabowo yang secara tidak langsung mendapat dukungan dari Jokowi.

Pengamat politik dan akademisi dari Universitas Bina Darma (UBD) Dr. Sulaiman Helmi, menyebutkan, munculnya nama Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo teras lebih keras terdengar di ajang Pilpres bukan nama-nama Capres dan Cawapres.

“Ini seperti pertarungan antara Megawati dan Jokowi, bukan sekedar Pemilu 2024 dan Pilpres saja,” ungkapnya.

Dia menyikapi munculnya nama Gibran yang didukung oleh keputusan MK akhirnya layak atau lolos bisa dipilih oleh partai untuk mencalonkan diri sebagai Cawapres. Dinilainya syarat adanya kepentingan politik munculnya dinasti politik yang mencaut.

Kemudian Megawati Soekarnoputri mengumumkan secara langsung Menko Polhukam Mahfud MD menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Munculnya konflik politik antara Megawati dan Jokowi mengakibatkan loyalitas

kader PDI Perjuangan di Indonesia ikut diuji karena kader akan memilih untuk ikut siapa dalam kondisi seperti ini.

“Posisi kader PDIP yang sekarang diuji. Mereka mau ikut siapa. Tetap ikut Megawati atau Jokowi,” tuturnya.

Di sisi lain, masuknya nama Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto tentu memicu perpecahan suara di Pulau Jawa. Utamanya Jawa Tengah yang menjadi basis utama PDIP.

Namun sebagian besar basis itu akan terpecah karena sebagian loyal terhadap Jokowi karena menjadi Walikota Solo dan sebagai Presiden, sebagian lagi loyal ke partai dan memilih Ganjar Pranowo.

Selain terjadinya perpecahan suara pendukung partai di daerah, suara Nahdlatul Ulama (NU) juga ikut terkena imbasnya.

Sulaiman Helmi menilai, pada Pilpres 2024 ini akan banyak terjadi perpecahan suara. Selain antara pendukung Megawati dan Jokowi, suara NU juga akan ikut terpecah belah.

Masuknya nama Mahfud MD mendampingi Ganjar. Lalu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Selanjutnya ada Prabowo dan Gibran yang banyak didukung tokoh-tokoh NU juga menimbulkan

persaingan yang sengit.

“Ada kondisi suara NU yang pecah. Ketika calon presiden sekarang melakukan pemasaran politik tentunya jangan sampai salah langkah. Kita lihat saja nanti calon pendamping mana yang menjadi penentu,” pungkasnya.

## Kader Daerah Siap Bersaing

Selain persaingan antara elit politik, pertarungan juga terjadi di tingkatan kader daerah. Para pendukung partai di daerah kini mulai ikut memanaskan mesin baik dalam pencalegan maupun di Pilpres.

Kader PDIP menilai apa yang diputuskan ketua umum mereka, Megawati

Soekarnoputri adalah hal yang terbaik. Tugas mereka selanjutnya adalah bekerja maksimal memenangkan pertarungan di Pilpres dan Pileg 2024.

Bendahara PDIP Sumsel Yudha Rinaldi mengatakan, pilihan Megawati Soekarnoputri sudah sangat tepat dan bijaksana memilih Mahfud MD. Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa wakil Ganjar Pranowo.

“Ibu Megawati

Soekarnoputri menentukan calon yang pas sebagai pendamping Pak Ganjar Pranowo. Pilihan itu sudah sangat ideal,” ucapnya.

Adanya nama Gibran sebagai Cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto dinilai bukan urusan dari partai.

Dia melihat biarkan masyarakat saja nanti menentukan apa yang dinilai. Fokus mereka saat ini adalah memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI.

“Kita tidak mau menilai yang bukan urusan partai. Kalau soal Gibran biarkanlah masyarakat Indonesia sendiri yang menilai soal kelayakannya,” jelasnya.

Terkait adanya hembusan konflik antara Megawati dan Jokowi apakah dirasakan oleh kader PDIP di Sumsel, Yudha tidak merasakan sama sekali.

“Tidak ada. Mungkin itu hanya asumsi-asumsi saja kalau kami merasakan tidak seperti itu. Biasa saja. Jelas Ibu Megawati berkata kami memilih calon pendamping Pak Ganjar Pranowo bukan untuk kepentingan Partai PDIP saja. Tetapi kami memilih pasangan yang cocok untuk menjadi pemimpin untuk rakyat bukan sekedar untuk partai,” jelasnya.

Terpisah, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) Gerindra Sumsel Medi Amazon mengatakan, Gibran sangat cocok menjadi pendamping Prabowo Subianto karena sebagai perwakilan dari kaum muda.

“Gibran dipilih oleh Partai Gerindra kami sangat mendukung karena sangat cocok untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto,” jelasnya.

Tetapi mereka sebagai sayap Partai Gerindra hanya ikut saja apapun keputusan dari pusat. Karena siapapun yang mendampingi Prabowo Subianto harapan hanya satu Presiden Indonesia adalah Prabowo Subianto.

Secara kondisi Pepera di Sumatera yakin Prabowo akan menang. Namun mereka hanya khawatir di Pulau Jawa notabene masih dalam kondisi persaingan ketat.

“Di Sumatera saya yakin Prabowo menang karena semuanya sudah Prabowo. Kalau di Jawa kita yang masih belum jelas,” tuturnya.

Menelisik calon persaingan lainnya Papera menyebutkan tidak terlalu mengganggu karena

Prabowo Subianto telah membuktikan pengabdianya kepada bangsa Indonesia.

“Semua bagus tetapi tetap saja masih baru di politik karena Prabowo Subianto sudah teruji. Makanya kami tidak ragu kalau Prabowo Subianto akan tetap menang di pemilu kali ini,” pungkasnya. ●RDR







“Contoh ketika ada masyarakat demo, Gibran tidak menghindar tapi malah menemui. Artinya Gibran mengerti bahwa semuanya harus kembali kepada demokrasi dimana setiap warga negara berhak menyampaikan suatu pendapat”

Maizar Bahar

# PAHAM JOKOISME SEMAKIN KUAT, GIBRAN BIKIN BANGGA KADER PSI DAERAH

**Sosok Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto membuat seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa bangga. Gibran dianggap sebagai orang yang tepat mewakili generasi muda Indonesia dalam berpolitik.**

**A**tas dasar itu pula, PSI mendeklarasikan diri sebagai partai yang ikut berkoalisi dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dukungan itu semakin kuat secara batiniah karena Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep adalah adik kandung dari Gibran Rakabuming.

Dukungan ini juga sekaligus memantapkan seluruh kader PSI untuk menyebut diri mereka sebagai Jokoisme. Dimana selera politik Joko Widodo tegak lurus dengan semangat demokrasi yang dibawa kader PSI hingga ke seluruh daerah di Indonesia.

Tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi PSI yang masuk dalam koalisi besar bersama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain peluang menang lebih besar masa depan PSI juga terasa terang benderang karena dinilai mampu meningkatkan elektabilitas partai.

Sehingga keputusan berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini menjadi suatu kebanggaan bagi kader PSI di daerah, khususnya di Sumatera Selatan.

Wakil Ketua DPW PSI Sumsel bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Novan Jhoni Irawan mengatakan, secara umum mereka sangat menghormati ketiga pasang Bacapres yang telah mendaftarkan dirinya ke KPU RI karena ketiganya merupakan putra terbaik yang dimiliki Indonesia.

Namun secara kepartaian tentu mereka memilih dengan sosok yang sejalan dan hal itu ada pada diri Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto. Pasangan ini mereka anggap mampu membawa Indonesia lebih maju lagi dan menjadi pilihan terbaik saat ini.

Utamanya mereka tentu mendukung program yang telah dicanangkan Presiden Jokowi dan menjadi sosok yang gencar memberantas tindak pidana korupsi. PSI memilih orang yang bisa mendukung pengesahan undang-undang perampasan aset bagi koruptor, karena kalau penerapan hukum bagi koruptor hanya dipenjarakan saja. Mereka harus dimiskinkan,”

terangnya.

Novan melihat sosok Gibran sebagai seorang anak muda yang energik, berpengalaman dalam kepemimpinan ditambah lagi kematangan seorang Prabowo Subianto tentu hal ini menjadi pasangan sempurna.

“Memang saatnya sosok muda yang memang dibutuhkan bangsa ini karena sama-sama kita ketahui bahwa anak muda terbelenggu selama 30 tahun di era Orde Baru dan menurut saya pribadi sosok Gibran sangat mewakili Generasi Z,” cetusnya.

Sebagai tim Bapilu PSI Sumsel, mereka tentu berusaha keras memenangkan pasangan Prabowo - Gibran di Sumatera Selatan.

“Pasangan ini saling melengkapi dan sosok yang disegani baik di Indonesia maupun mancanegara. Bahkan terbukti Gibran mampu mengurangi angka kemiskinan di Kota Solo. Jadi menurut saya pasangan ini bisa saling mengisi dan melengkapi,” ungkap Novan.

Sementara Maizar Bahar, Wakil Ketua 1 DPW P S I

Sumsel bidang organisasi menambahkan, sebagai kader mereka butuh sosok segar yang bisa membawa kedamaian semua kalangan tanpa mengotak-ngotak atau intoleran, peduli dengan kesehatan serta punya komitmen memberantas korupsi.

“Memberantas korupsi yakni yang mau mengesahkan undang-undang perampasan harta koruptor. Koruptor itu tidak takut dipenjarakan tapi mereka takut miskin. Kalau dipenjarakan mereka ketawa-ketawa saja karena hartanya masih banyak,” terang Maizar yang sebelumnya berprofesi sebagai seorang guru ini.

Maizar memandang, sosok Gibran adalah pribadi yang santun dan santuy. Artinya sosok yang sesuai dengan selera politik kader PSI.

“Contoh ketika ada masyarakat yang demo, Gibran tidak menghindar tapi malah menemui. Artinya Gibran mengerti bahwa semuanya harus kembali kepada demokrasi dimana setiap warga negara berhak menyampaikan suatu pendapat sesuai dengan peraturan undang-

yang berlaku. Bahkan setelah didekati mereka semua malah minta foto bersama,” ujarnya.

Selain berusaha maksimal memenangkan pencapresan Prabowo - Gibran lanjutnya, seluruh kader PSI juga terus melakukan berbagai sosialisasi ke masyarakat sekaligus menawarkan program yang mereka angkat di Pemilu 2024 ini.

Bahkan dalam dua bulan belakangan ini mereka kerap mendatangi dan turun langsung ke titik-titik masyarakat yang membutuhkan perhatian dan belum tersentuh oleh kebijakan publik seperti mendapatkan hidup yang layak, belum tersentuh air bersih dan aliran listrik.

“Untuk target partai PSI Sumsel sendiri kami menargetkan satu Dapil satu kursi karena semenjak partai PSI dipimpin Kaesang Pangarep para kader lebih bersemangat dan suasana politik menjadi lebih berwarna” cetusnya.

Diakui Novan dan Maizar, sosok Kaesang Pangarep memberikan pengaruh yang besar terhadap PSI. Gaya politik putra Presiden Jokowi ini membawa perubahan bagi PSI lebih baik lagi.

“Kaesang meminta seluruh kader untuk berpolitik secara gembira, santun, santuy serta tidak menjelek-jelekkan pihak lain. Kaesang effect juga terasa di PSI, kini ada ribuan yang mendaftar untuk menjadi kader PSI,” ungkap Novan.

Di sisi lain masuknya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI makin memantapkan para kader untuk mengusung paham dan pemikiran Jokowi yang mereka sebut Jokowiisme.

## Menteri Pilihan Kader PSI

Meski proses Pilpres 2024 masih panjang namun ada banyak keyakinan dari para kader PSI di daerah. Selain berharap Prabowo dan Gibran jadi Presiden dan Wapres RI mereka juga ingin ikut berbakti kepada negara lebih besar kepada negara dengan ikut andil di kabinet.

Setidaknya ada dua jabatan menteri yang diinginkan para kader PSI bila Prabowo - Gibran berhasil memimpin Indonesia nanti.

“Kalau diberi kesempatan, mungkin kursi Menteri Pendidikan. Sebagai seorang guru dan pendidik kita butuh sosok kreatif dalam mendidik generasi muda saat ini,” ucap Maizar.

Sementara Novan berharap PSI bisa diberi kewenangan di bidang kepemudaan dan olahraga. Hal ini berkaca pada sosok Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep seorang anak muda yang juga pecinta olahraga.

Dia yakin Kaesang bisa mengemban tugas tersebut dan membawa prestasi olahraga dan anak muda Indonesia lebih baik lagi.

“Mungkin menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) karena sosok Kaesang, ketua umum kami merupakan pecinta olahraga dan seorang anak muda,” harapnya. ●RDR





“Tidak bersepakat dua hal, tidak bersepakat untuk proses ini bersidang pada masa reses. Yang kedua, tidak sepakat pilkada dimajukan”

Willy Aditya



# DPR PASTIKAN PILKADA DIMAJUKAN

**Badan Legislasi DPR secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada) menjadi usulan inisiatif DPR.**

**S**alah satu poin krusial utama yang disepakati dalam rapat pleno tersebut yakni memajukan pelaksanaan Pilkada dari November menjadi September 2024.

“Selanjutnya ini akan dikirim (dan) di (bawa ke) paripurna di masa sidang yang akan datang, kemudian dikirim ke Presiden. Presiden kita menunggu Surpres (Surat Presiden)-nya turun dan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)-nya, baru kemudian akan dibahas di pembicaraan tingkat satu,” ujar Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, usai memimpin rapat pleno di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini berharap dengan majunya Pilkada 2024 dari November menjadi September, nantinya pelantikan serentak kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dapat diselenggarakan pada Januari 2025.

“Kenapa ini dilakukan? Ini akan memperkuat sistem presidensial kita semakin efisien ya kan, kita tidak disibukkan setiap saat Pilkada terus menerus juga proses pelantikannya yang tidak bersamaan. Sehingga nanti hubungan antara presiden, gubernur, wali kota, bupati itu akan seiring sejalan, itu filosofinya yang kami ingin bangun,” tegasnya.

Tak hanya itu, dalam RUU tersebut juga akan mengatur pelantikan anggota DPRD kabupaten, kota dan provinsi diadakan di November 2024. “Artinya nanti akan ada kekosongan anggota DPR, DPRD kabupaten/kota maupun provinsi selama tiga bulan. Nah, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, itu nanti akan diserahkan secara berjenjang, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh gubernur pada tingkat kabupaten dan kota,” jelasnya.

“Kalau di daerah provinsi itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, karena mereka kan rezimnya rezim pemerintah daerah, sehingga berbeda dengan anggota DPR RI, ya. Dan yang ketiga adalah menyangkut soal keserentakan pelantikan kepala daerah,” lanjut Supratman.

Dalam rapat pleno Baleg DPR tersebut, tercatat mayoritas pandangan fraksi yaitu sebanyak enam fraksi menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi usulan inisiatif DPR. Sementara, tiga fraksi tercatat belum bisa menerima RUU

Pilkada menjadi usulan inisiatif DPR.

Sebelumnya, Baleg DPR menggelar rapat pleno dalam penyusunan draf revisi UU Pilkada pada 23 Oktober 2023. Padahal, DPR saat itu tengah masuk dalam masa reses pada 4-30 Oktober 2023.

Supratman mengatakan, revisi UU Pilkada untuk mengakomodasi percepatan pelaksanaan Pilkada 2024. Awalnya, Pilkada 2024 dilaksanakan pada November, namun pelaksanaannya akan dipercepat menjadi September.

“Undang-undang ini dianggap sangat urgen dan mendesak dalam hal pertimbangannya menyangkut soal waktu, kalau ini disepakati. Sekali lagi kalau disepakati oleh semua fraksi ya atau sebagian besar fraksi terkait keinginan untuk memajukan jadwal pilkada,” ujar Supratman dalam rapat pleno penyusunan draf revisi UU Pilkada, Senin, 23 Oktober 2023.

“Tadinya di Undang-Undang Pilkada itu ada di November, kemudian rencananya akan dimajukan pada September,” sambungnya.

Baleg sendiri mengaku sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan Komisi II untuk melakukan penyusunan draf revisi UU Pilkada. Komisi II diklaim setuju untuk melakukan revisi untuk mempercepat Pilkada 2024.

“Terlepas setuju atau tidak, jadi sekali lagi kami belum bicara setuju atau tidak, tetapi kami kalau seandainya sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II terkait dengan materi muatan yang tadinya adalah bentuknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), dan seluruh materi muatan yang ada di dalam draf ini adalah semua materi muatan yang sudah dan telah disepakati teman-teman Komisi II,” ujar Supratman.

Supratman menjelaskan, revisi UU Pilkada perlu segera dilakukan karena adanya urgensi berdasarkan permintaan pemerintah. Namun, Supratman menegaskan, rapat pleno tersebut baru hanya untuk mendengarkan naskah akademik draf revisi UU Pilkada.

“Kalau kami nanti bersepakat

bahwa pilkada itu akan dimajukan di September, otomatis waktunya pasti akan sangat tidak cukup kalau dimulai proses penyusunan di Komisi II,” ujar Supratman.

“Oleh karena itu, soal pembahasannya nanti apapun yang kami hasilkan, nanti kalau seandainya pembahasannya di pembahasan tingkat I kami sudah bersepakat dengan pimpinan Komisi II dan kepada pimpinan DPR, menyerahkan pada Badan Musyawarah untuk membahas di Komisi II,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Supratman menambahkan, setidaknya ada tiga poin utama yang akan direvisi dalam UU Pilkada. “Satu adalah penyesuaian norma berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itulah kami masukkan ke dalam kumulatif terbuka dan tidak perlu masuk dalam Prolegnas, sebagaimana yang sering kami lakukan,” ujar Supratman dalam rapat pleno pembacaan naskah akademik revisi UU Pilkada, Selasa, 24 Oktober 2023.

Kedua, akan merevisi pasal terkait jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dari awalnya akan digelar pada November, jika revisi tersebut disahkan menjadi undang-undang, pilkada akan dilaksanakan pada September.

“Ketiga adalah menyangkut soal pelantikan secara serentak dengan berbagai macam konsekuensinya. Ini di rancangan ini pelantikan anggota DPRD di bulan November. Kemudian untuk pelantikan bupati, gubernur, dan seterusnya di Januari 2025, dengan segala macam konsekuensinya,” ujar Supratman.

Adapun dalam naskah akademik yang dibacakan tenaga ahli dari Baleg, setidaknya ada tiga pertimbangan yang membuat DPR memilih untuk merevisi UU Pilkada. Padahal awalnya, percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 akan diatur lewat

perppu.

Pertimbangan pertama adalah bawah seluruh kepala daerah definitif akan berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024. Kondisi tersebut membuat seluruh daerah tak memiliki kepala daerah definitif pada Januari 2025.

Pertimbangan kedua, dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan hubungan dan tata kelola pemerintahan antara kepala daerah dengan DPRD. Termasuk sinkronisasi dan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Ketiga, adanya pertimbangan kebutuhan hukum di masyarakat atas beberapa putusan MK. Karena tiga pertimbangan tersebut, diperlukan revisi UU Pilkada yang akan menjadi perubahan yang keempat.

Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR, Willy Aditya, mempertanyakan urgensi Baleg DPR untuk menggelar rapat pembahasan revisi UU Pilkada, terlebih di tengah masa reses.

“Ini juga persidangan di masa reses, apa sih yang mau dikejar? Saya dari Fraksi NasDem menyikapi ya enggak ada yang terlalu urgen untuk dipaksakan,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023.

Ia menyebut bahwa poin pembahasan dalam rapat revisi UU Pilkada itu hanya membahas soal perubahan waktu pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024 menjadi 17 September 2024. Menurutnya, pembahasan soal waktu pelaksanaan Pilkada 2024 yang sedianya direncanakan melalui perppu itu dilakukan di Komisi II DPR, namun kini mengambil jalur revisi UU Pilkada lewat Baleg DPR.

“Ini harusnya kan domain Komisi II. Kalau toh itu hanya berkaitan dengan pergeseran pilkada dari November ke September, ya Komisi II kan waktu itu komitmen sama pemerintah (melalui) perppu. Kenapa DPR yang ingin menarik ini?” ujarnya.

Untuk itu, Willy mengatakan bahwa Fraksi NasDem mempertahankan agar jadwal pelaksanaan pilkada serentak tetap digelar pada November 2024.

“Tidak bersepakat dua hal, tidak bersepakat untuk proses ini bersidang pada masa reses. Yang kedua, tidak sepakat pilkada dimajukan,” tegasnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto, mengatakan fraksinya menerima usulan rencana revisi waktu pelaksanaan pilkada pada 17 September 2024. Dia menjelaskan alasan perubahan waktu itu, sebagai upaya keserentakan waktu pelantikan kepala daerah terpilih pada Januari 2025.

Dia mengungkapkan mekanisme awal disepakati adalah perppu, tetapi setelah komunikasi dengan pemerintah, ternyata pemerintah lebih nyaman dengan undang-undang.

•RDO







“Saya berharap KSAD Agus Subiyanto bisa menjaga anak buahnya agar netral dalam Pileg dan Pemilu mendatang”

Puan Maharani

# TUGAS KSAD BARU JAGA KONDUSIVITAS PEMILU

**Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun. Pelantikan tersebut dilakukan di di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.**

Pelantikan tersebut digelar berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Agus Subiyanto sebagai KSAD.

Agus Subiyanto juga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal TNI. Kenaikan pangkat Agus Subiyanto didasarkan pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/TNI/Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

Agus Subiyanto merupakan perwira tinggi TNI AD lulusan Akademi Angkatan Militer 1991. Pria yang lahir di Cimahi, 5 Agustus 1967, tersebut sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Agus mengatakan bahwa ia akan berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga serta elemen masyarakat untuk membantu melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka Pemilu Serentak 2024.

“Jadi kita tidak bekerja sendiri, tentunya dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Indonesia,” ujar Agus.

Terkait kondusivitas, Agus menuturkan ada 802 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Pihaknya dan Polri serta elemen masyarakat akan mengamankan TPS-TPS.

“Tadi saya sudah sampaikan bahwa bapak Presiden menyampaikan untuk membuat kondusif di semua wilayah. Kalau kita lihat ada 802 ribu TPS yang ada, nanti saya bersama Polri dan semua elemen masyarakat yang paling terendah di situ akan mengamankan TPS-TPS. Sehingga pada saat pencoblosan dan lain-lain akan aman lah ya,” jelas Agus.

Soal wilayah rawan pemilu, Agus mengatakan pihaknya akan memba-

has lebih lanjut bersama Polri dan pihak terkait. Dia mengatakan potensi setiap daerah memiliki kerawanan yang berbeda-beda.

“Kalau kita di TNI itu kodam itu punya rencana kontijensi, renkon namanya, di setiap wilayah itu beda-beda. Mungkin kalau di Jakarta konflik sosial karena banyak demo, di Jawa Barat mungkin kontijensinya bencana alam karena dekat dengan gunung berapi dan sebagainya. Jadi para pangdam nanti akan memaparkan ke saya tentang rencana kontijensi. Demikian juga

DPR saya ucapkan selamat bertugas kepada Jenderal Agus Subiyanto sebagai KSAD yang baru. Semoga di bawah kepemimpinan Jenderal Agus, TNI AD semakin kuat, kompak dan tetap maju demi menjaga keutuhan NKRI,” kata Puan.

Dengan kepemimpinan TNI AD yang baru, Puan berharap para prajurit dapat semakin meningkatkan profesionalitas sebagai alat pertahanan negara. “Dengan berbagai jabatan strategis yang pernah di emban Jenderal Agus, saya meyakini bahwa TNI AD kedepannya akan lebih

pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini pun menyinggung soal peran TNI dalam demokrasi, terutama di tahun politik jelang Pemilu 2024. Meski TNI bertugas untuk membantu menjaga situasi kondusif pada Pemilu, Puan mengingatkan kembali agar prajurit menjunjung tinggi netralitas.

“Prajurit TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau menjadi alat politik dari kelompok atau partai manapun. KSAD yang baru perlu memastikan bahwa semua prajurit memahami peran TNI dalam mendukung sistem demokrasi di Indonesia dan tidak terlibat dalam politik praktis,” paparnya.

“Saya berharap KSAD Agus Subiyanto bisa menjaga anak buahnya agar netral dalam Pileg dan Pemilu mendatang. Pastikan tidak ada satupun prajurit TNI AD yang terlibat politik praktis dan tegas memberi sanksi apabila ada yang melakukan pelanggaran,” lanjut Puan.

Dia menambahkan, politik TNI adalah politik kenegaraan sesuai tugas dan fungsinya. Puan meminta semua prajurit TNI AD bekerja dengan profesional saat membantu menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 agar berlangsung dengan kondusif di seluruh wilayah di Tanah Air.

“Saya yakin Jenderal Agus Subiyanto merupakan pemimpin teladan yang dapat memberikan contoh kepada seluruh prajurit TNI AD untuk menjunjung tinggi netralitas demi terciptanya Pileg dan Pilpres 2024 yang damai dan gembira bagi Masyarakat. Saya yakin prajurit TNI akan tegak lurus menjaga sumpahnya untuk menjaga keutuhan ibu pertiwi serta persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, analis intelijen pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menilai, Pemilu 2024 menjadi tantangan bagi Jenderal Agus. “Saya yakin Agus Subiyanto mampu menaklukan tantangan itu dengan baik,” kata Ngasiman.

Menurutnya, Pemilu 2024 membutuhkan perhatian serius. Terlebih setelah pasangan bakal capres-cawapres diumumkan. Pertarungan antarcalon untuk memperebutkan hati pemilih akan semakin sengit.

Menurut Simon, panggilan akrab Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA) Jakarta ini, masa kampanye Pemilu 2024 diprediksi semakin ramai, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Dukung mendukung pasangan capres-cawapres di tengah masyarakat sedikit banyak akan menimbulkan friksi.

Sehingga, setidaknya ada dua hal yang dihadapi Agus Subiyanto. Yaitu memastikan situasi politik tetap kondusif sebagai bagian dari tugas pertahanan dan keamanan nasional.

“Sebab dalam pemilu itu, rawan terjadi penyusupan ideologi-ideologi yang mengajarkan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Ini yang harus diantisipasi dan ditangani lebih dini oleh TNI,” kata Simon. ● RDO



untuk kerawanan-kerawanan pemilu ini,” ucapnya.

Ketua DPR, Puan Maharani, menyambut baik pelantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang pensiun. Secara khusus, Puan berharap Jenderal Agus dapat memimpin TNI AD membantu menciptakan pelaksanaan Pemilu 2024 agar berlangsung damai.

“Atas nama pribadi dan atas nama

baik lagi dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa,” tutur mantan Menko PMK itu.

Selain sebagai alat pertahanan kedaulatan negara, TNI AD juga mengemban sejumlah tugas lain. Dengan kepemimpinan eks Komandan Paspampres itu, TNI AD diyakini akan semakin memberikan pengabdian terbaiknya untuk rakyat.

“TNI bukan hanya soal alat pertahanan negara, tapi juga berperan dalam membantu berbagai kesulitan masyarakat yang masuk dalam tugas operasi militer non perang. Prajurit TNI AD harus meningkatkan rasa asih, asah, dan asuh untuk rakyat Indonesia,” terang Puan. Perempuan





“Kita rapatkan barisan. Target kita memperoleh sebanyak 11 juta suara pada pemilu yang akan datang”

*Sandiaga Uno*



# MENANGKAN GANJAR-MAHFUD WUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

**Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama seluruh partai koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat ini sedang menyusun strategi pemenangan.**

**H**al itu setelah Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dokumen pendaftaran keduanya juga telah dinyatakan lengkap.

Ganjar-Mahfud diusung oleh PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Seluruh partai pengusung ingin duet Ganjar-Mahfud ini bisa merebut kekuasaan di 2024.

Juru Bicara Plt Ketua Umum PPP, Imam Priyono, menyampaikan, PPP sangat mendukung dan akan membantu pasangan Ganjar-Mahfud untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024. Selain itu, PPP mengharapkan Ganjar-Mahfud bisa membawa perbaikan bagi bangsa Indonesia, sehingga dapat mewujudkan cita-cita reformasi.

“Kami mengharapkan Ganjar -Mahfud mampu mengantarkan Indonesia kepada cita-cita kemerdekaan Indonesia,” kata Imam.

Tidak hanya itu, PPP percaya bahwa pasangan Ganjar-Mahfud bisa membawa Indonesia keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju di 2045.

“Mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan unggul pada usia emas Indonesia di 2045,” jelas Imam.

Dia menyampaikan, visi-misi dari pasangan tersebut juga sudah sangat jelas dalam membawa program kerja untuk menyosong bangsa Indonesia menjadi negara yang maju dan unggul dari berbagai bidang.

“Hal ini tertuang dalam visi misi Ganjar -Mahfud, yaitu Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari,” kata Imam.

Dalam mewujudkan visi-misi tersebut, Ganjar-Mahfud juga menjabarkan hal-hal yang perlu dipenuhi atau dilakukan. Yang terpenting, harus ada ketersediaan anggaran. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi seperti korupsi harus diberantas hingga akar-akarnya.

“Yang berlandaskan tiga fondasi yaitu ketersediaan anggaran, pemberantasan korupsi, dan digitalisasi birokrasi,” kata Imam.

Imam mengungkapkan, dalam memen-

angkan pasangan Ganjar-Mahfud, PPP akan akan melibatkan generasi muda dalam kampanyenya untuk menggaungkan program kerja dari pasangan tersebut yang akan dilakukan di 2024 mendatang.

“Salah satu dari banyak strategi yang akan dijalankan adalah menggaet sebanyak-banyaknya milenial dan Gen Z menjadi juru bicara yang akan turun langsung ke Masyarakat, dan berkomunikasi langsung terkait beragam program yang akan dijalankan saat Insya Allah Ganjar-Mahfud nantinya terpilih,” beber Imam.

Selain itu, Ganjar-Mahfud juga akan turun langsung ke masyarakat di seluruh Indonesia untuk menyampaikan visi-misi serta program kerja. Hal ini dilakukan agar pasangan ini bisa menarik simpati masyarakat. Selain itu, bisa

mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat secara langsung.

“Maka mereka berdua akan berkeliling ke seluruh pelosok negeri untuk menyapa dan berdiskusi langsung dengan masyarakat dari berbagai lapisan sosial,” kata Imam.

Imam menambahkan, pada Pemilu Serentak 2024, Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, juga memberikan pesan khusus kepada seluruh kader partainya. Dia meminta seluruh kadernya untuk menjaga stabilitas politik dan menjaga keharmonisan dalam Pemilu Serentak 2024, meski berbeda pilihan.

Mardiono juga mengharapkan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya perpecahan di masyarakat. Selain itu, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan bisa menyambut pemilu dengan penuh senyum dan kegembiraan.

“Bapak Muhammad Mardiono mengharapkan pemilu berlangsung layaknya sebuah pesta demokrasi, berlangsung dengan semarak, penuh senyuman dan bergembira,” kata Imam.

Imam menyampaikan, Ketua Umum PPP juga berharap siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya bisa membawa bangsa ini menjadi negara yang unggul dan bisa mewujudkan Indonesia Emas di 2045.

“Beliau juga berharap pemimpin yang terpilih nanti bisa mewujudkan Indonesia yang maju dan mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia,” tutur Imam.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan unggul juga harus memperhatikan beberapa factor, di antaranya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah juga harus bisa menjadi kepanjangan tangan rakyat dan membela kepentingan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Di antaranya yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Imam.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno, mengajak pengurus PPP di semua tingkatan untuk merapatkan barisan menjelang Pemilu 2024. Hal ini disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VIII PPP bertema “Perkuat Ekonomi Rakyat, Menangkan PPP di Pemilu 2024” di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023.

Sandiaga menjelaskan, PPP telah menargetkan perolehan 11 juta suara pada Pemilu 2024. Untuk itu, menjaga soliditas kader dan pengurus partai menjadi hal penting.

“Kita rapatkan barisan. Target kita memperoleh sebanyak 11 juta suara pada pemilu yang akan datang,” ujar Sandiaga.

Pada Rapimnas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini juga memaparkan pentingnya menggaet pemilih muda pada Pemilu 2024. Sebab, pemilih milenial dan generasi Z menjadi salah satu segmen terbesar pada Pemilu 2024, yakni mencapai 160 juta pemilih.

“Angka partisipasi 80 persen atau sekitar 160 juta pemilih di pemilu 2024 adalah generasi milenial dan generasi Z, ini yang harus kita ambil karena ceruknya luas” paparnya.

Sandiaga menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus dalam membidik pemilih generasi milenial dan generasi Z. Strategi tersebut akan dijalankan selama masa kampanye. Akan tetapi, Sandiaga tidak membeberkan strategi tersebut.

“Kampanye hanya 117 hari dari sekarang. Kita akan buat kegiatan berdasarkan aktivasi, semua kegiatan berdasarkan Pilpres,” kata Sandiaga.

•RDO







“PDIP wajib membatasi persepsi negatif cukup sampai kepada partai saja, tidak sampai kepada sosok ketua umum”

Efriza

# PDIP Tak Mau Pecat GIBRAN ENGGAK MAU MUNDUR

**Tampilnya Gibran Raka-buming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto memunculkan spekulasi mengenai keanggotaan putra sulung Presiden Jokowi tersebut di PDIP.**

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan, keputusan Gibran menunjukkan sikap tidak tegak lurus terhadap partai.

“Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Tidak perlu heboh. Dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti, dan beralih itu hal yang biasa,” ujar Komarudin lewat keterangannya, Kamis, 26 Oktober 2023.

Ia pun mengungkap pertemuan pertama kali antara Gibran dan Prabowo di Solo, Jawa Tengah, pada 19 Mei 2023. Setelah pertemuan itu, DPP PDIP langsung memanggilnya untuk meminta klarifikasi wali kota Solo itu pada 22 Mei 2023.

Pada saat itu, DPP PDIP tak memberikan sanksi kepada dan hanya memberikan nasihat serta memintanya tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dengan adanya kasus Gibran ini, ia mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tegak lurus terhadap perintah partai. PDIP diketahui telah resmi mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dia pun mencontohkan kader senior PDIP, yakni FX Hadi Rudyatmo, yang tegak lurus terhadap perintah partai. Megawati juga sudah menegaskan, semua elemen partainya harus turun untuk memenangkan Ganjar dan Pemilu 2024.

“Pada akhirnya, melalui kejadian ini publik akan tahu, mengenal, menilai, dan memutuskan tentang sosok, akhlak, karakter, dan perilaku calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan,” ujar anggota Komisi II DPR itu.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengingatkan, Gibran bahwa ada aturan dalam berorganisasi. Mereka memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang harus dipenuhi seluruh kadernya. Dalam hal ini, termasuk perintah Megawati untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud. Bukan justru menjadi cawapres dari sosok yang tak diusung PDIP.

“Ketika Mas Gibran mengambil pilihan lain, yaitu mencalonkan dirinya sebagai cawapres bertentangan dengan garis keputusan politik partai. Maka dengan sendirinya dia keluar dari aturan main

kepartaian itu. Maka setelah dia mengambil sikap mengambil keluar dari aturan resmi partai yang tersisa dari Mas Gibran itu adalah sebuah etika politik, harusnya dia mengundurkan diri secara resmi,” ujar Basarah.

Dia pun menyinggung etika politik, ketika ditanya mengapa PDIP tidak memilih memecat Gibran, seperti yang dilakukan kepada Effendi Simbolan dan Budiman Sudjatmiko. Kepala dua kadernya yang mbalelo tersebut, PDIP bisa tegas langsung memecatnya ketika mendukung Prabowo Subianto.

Sayangnya, PDIP tidak bisa tegas ketika Gibran malah menjadi cawapres pendamping Prabowo. Basarah memiliki keyakinan, rakyat tahu bahwa putra sulung Presiden Jokowi itu bukan lagi bagian dari partainya.

“Jadi tanpa harus diberhentikan secara resmi sebenarnya rakyat telah menganggap Mas Gibran keluar dari PDI Perjuangan. Karena telah mengambil keputusan keluar dari dari garis politik partai yang resmi,” ucap Basarah.

Sementara, Gibran merespons santai pernyataan Komarudin Watubun yang menyebut secara de facto keanggotaannya telah berakhir sesuai diajukan sebagai cawapres dari KIM.

“Ya itu sudah kalau sudah berstatemen seperti itu ya sudah. (Otomatis keluar) Ya saya ngikut saja kalau pak Komar sudah berstatemen seperti itu,” kata Gibran di balai kota Solo, Jumat, 27 Oktober 2023.

Kendati demikian, Gibran mengatakan KTA PDIP miliknya masih dibawa. Ia juga mengaku siap dan akan menjadwalkan pengembalian

tersebut seperti yang diminta Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Disinggung apakah dengan itu urusan antara dirinya dengan PDIP sudah benar selesai, Gibran mengaku sudah berbicara dengan baik dengan ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua TPN GP Arsjad Rasjid.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai lunaknya PDIP terhadap Gibran disebabkan masih tingginya peran Jokowi terhadap PDIP menjelang Pemilu 2024. Hal itu terekam dalam hasil surveinya yang menunjukkan bahwa alasan terbesar kedua para responden memilih PDIP adalah karena sosok Jokowi, yakni sebesar 23,9 persen.

“Alasan terbesar kedua memilih partai ini karena faktor Jokowi, sementara yang memilih Ibu Mega sebagai ketua umum partai itu hanya 2,2 persen. Nah, ini menarik karena hubungan keduanya belakangan dianggap sedang tidak baik-baik saja,” ujar Burhanuddin.

Alasan terbesar pertama para responden memilih PDIP adalah karena terbiasa memilih partai tersebut, yakni sebesar 28,4 persen. Alasan berikutnya adalah kinerja partai (7,1 persen), anggota keluarga memilih partai tersebut (7,0 persen), dan partai tersebut suka memberi bantuan (6,8 persen).

Selanjutnya, responden suka dengan partai tersebut (5,1 persen), mendukung kebijakan partai (3,5 persen), komunitas atau suku memilih partai tersebut (3,3 persen), dan karena suka Megawati (2,2 persen).

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai, langkah PDIP yang hingga saat ini belum memberikan peringatan keras terhadap aksi Gibran

khawatir reaksi negatif publik yang berdampak terhadap citra dan elektabilitas partai.

Selain menjaga efek elektabilitas partai, PDIP saat ini juga memperhitungkan efek domino jika mengambil keputusan memecat Gibran. Hal itu dianggap dapat menimbulkan persepsi publik bahwa hubungan antara Jokowi dan Megawati tidak dalam keadaan baik-baik saja.

Menurut Efriza, saat ini PDIP juga sedang menjaga resistensi citra dan elektabilitas partai agar tetap stabil akibat ulah Megawati yang selama ini dinilai telah merendahkan Presiden Jokowi dihadapan publik agar tidak lagi menjadi konsumsi luas bagi masyarakat.

“PDIP wajib membatasi persepsi negatif cukup sampai kepada partai saja, tidak sampai kepada sosok ketua umum,” kata Efriza, Kamis, 26 Oktober 2023.

Sebelumnya, publik juga digegerkan atas keputusan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang menjadi Ketua Umum PSI. Hal itu juga dinilai telah melanggar AD/ART PDIP.

Menurut Efriza, PDIP saat ini merespon dengan lambat terkait Gibran yang menjadi cawapres Prabowo dan Kaesang menjadi Ketum PSI. Hal itu tak terlepas dari sikap partai yang ingin menurunkan resistensi negatif penilaian publik.

Efriza menilai, keputran Gibran dan Kaesang yang membelot dari arahan partai ditengarai merupakan representasi runtuhnya kualitas pengkaderan di internal PDIP. Sehingga, merusak persepsi publik yang selama ini telah menganggap PDIP memiliki kader-kader yang militan.

“Jadi kejadian Kaesang ke PSI, Gibran ke Golkar, kedua kasus ini amat merusak persepsi PDIP sebagai partai yang mapan dalam pengkaderan karena kader-kadernya selama ini satu rampak barisan. Artinya, PDIP sedang berusaha menurunkan persepsi negatif publik kepada PDIP,” ungkap Efriza.

Efriza melihat, aksi Gibran, Kaesang, dan Budiman Sudjatmiko yang lebih memilih meninggalkan arahan Megawati adalah salah satu bukti bahwa PDIP gagal mendidik kadernya untuk loyal dan tak haus kekuasaan. Opsi memecat Gibran, Kaesang dan Jokowi dari partai juga malah akan menguntungkan bagi keluarga dari Jokowi karena akan membantu memindahkan persepsi negatif dari mereka ke PDIP.

“Sehingga, strateginya adalah menggantung status keanggotaan Gibran agar persepsi negatif dari publik semakin banyak ke Gibran karena tidak dianggap tak peduli tentang kejelasan status kadernya,” kata Efriza.

Efriza mengungkapkan, disamping persepsi negatif, PDIP juga harus berusaha memberikan sikap hormat kepada Jokowi dan keluarganya. Sebab, jika tanpa Jokowi diyakini PDIP tidak mungkin kembali memimpin republik ini dengan dua periode.

Keputusan PDIP belum memecat keluarga Jokowi merupakan bentuk spesialisasi kehormatan dari Megawati terhadap Jokowi atas perjuangan selama ini yang membantu partai itu memenangkan pemilu dua periode. ●RDO





“Kemenangan dalam pilpres biasanya akan menjadi energi tambahan untuk meraih kemenangan di pilkada”



*Surokim Abdussalam*

# GERINDRA MAKIN PEDE DI PILKADA 2024

**Pemilu 2024 menjadi masa bagi Partai Gerindra untuk bisa meraih kesuksesan tertinggi sejak didirikan pada 2008, yakni dengan mengantarkan Prabowo Subianto sebagai presiden dan memenangkan Pemilihan Legislatif.**

“Sudah 3 kali pemilu, perjuangan kita harus tuntas. Sekali ini Pak Prabowo harus jadi presiden dan Gerindra harus menang,” kata Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam sambutannya di Lapangan Sepak Bola Cendrawasih, Jakarta Barat, Sabtu, 26 Agustus 2023.

Harapan itu nampaknya bisa diwujudkan mengingat elektabilitas partai berlambang garuda ini yang makin menanjak dan bersaing ketat dengan PDIP. Jika bisa membawa Prabowo menjadi presiden dan menang Pileg, Langkah berikutnya bisa jadi makin mudah bagi Partai Gerindra saat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Partai Gerindra saat ini juga diuntungkan dengan dukungan partai lain dalam Koalisi Indonesia Maju. Yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa partai anggota koalisi tersebut memiliki ikatan yang solid satu sama lain.

“Kami sudah solid dan memiliki team work (kerja tim) yang sangat kokoh,” kata Prabowo.

Salah satu bukti kokohnya kerja sama partai KIM itu, kata Prabowo, adalah kesepakatan bulat di antara mereka untuk meneruskan program-program yang dirintis oleh Presiden Joko Widodo.

“Tadi semua ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya dan dihasilkan suatu kesepakatan menyangkut arah

perjuangan, yaitu kami bertekad untuk melanjutkan arah pembangunan yang dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita, terutama yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo,” kata Prabowo.

Sebagian ketua umum partai anggota KIM, kata Prabowo, merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju. Sehingga, koalisi tersebut sudah memahami strategi pembangunan yang diimplementasikan Jokowi.

Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan koalisi pengusung Prabowo itu dinamai Koalisi Indonesia Maju, yang serupa dengan nama kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait peta pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Pemilu 2024, salah satunya terkait elektabilitas partai politik. Survei dilakukan sebelum pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Peneliti LSI, Djayadi Hanan, memaparkan hasil survei pilihan partai politik simulasi 18 nama. Hasilnya, PDIP unggul 26,1 persen, disusul Gerindra 14,4 persen, dan Golkar 9,7 persen. Lalu, PKB 7,6 persen, NasDem 7 persen, PKS 6 persen, Demokrat 4,3 persen, PAN 4,2 persen.

Peneliti senior Voxpopuli Research Center, Prijo Wasono, mengatakan, persaingan PDIP dan Partai Gerindra untuk memperebutkan elektabilitas tertinggi semakin ketat. Menurut hasil survei versi Voxpopuli Research Center, PDIP masih mempertahankan peringkat pertama dengan elektabilitas sekitar 17,4 persen. Di urutan kedua, muncul Gerindra dengan 17,0 persen.

Prijo menilai elektabilitas PDIP belum sepenuhnya pulih ke posisi seperti awal

tahun setelah sempat merosot usai heboh Piala Dunia U-20. Sebaliknya, Gerindra masih menikmati lonjakan elektabilitas dan terus mendekati posisi PDIP.

“Persaingan PDIP dan Gerindra makin ketat, sedangkan partai-partai lain masih stabil elektabilitasnya,” kata Prijo.

Menurut Prijo, ketatnya persaingan dua partai besar pendukung pemerintah itu menunjukkan bekerjanya coattail effect (kecenderungan seorang pemimpin partai politik populer untuk menarik suara kandidat lain) dari pencapresan.

“Menguatnya elektabilitas Prabowo Subianto disertai dengan kenaikan signifikan Gerindra sebagai partai utama pengusung Menteri Pertahanan itu,” jelas Prijo.

Prijo mengatakan elektabilitas Gerindra yang semula terpaut hingga 5 persen dengan PDIP, kini semakin ketat menempel PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. “Anjloknya elektabilitas Ganjar pada survei April memerlukan pemulihan berbulan-bulan dan berdampak pada stagnannya PDIP,” ujarnya.

## Peluang Koalisi Berlanjut

Namun, meski diklaim punya ikatan yang solid, peluang koalisi Partai Gerindra dengan partai lain di Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum tentu bisa berlanjut di Pilkada 2024.

“Tidak selalu koalisi di tingkat nasional itu berlanjut ke koalisi di daerah. Konfigurasinya kadang bisa berbeda. Namun, potensi berlanjut di daerah (pilkada) akan relatif besar karena sdh ada kesamaan frekuensi di tingkat pusat,” kata Peneliti Politik Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, kepada Info Indonesia, Jumat, 27 Oktober 2023.

Meski demikian, menurut Surokim, paling tidak Partai Gerindra dan KIM akan lebih mudah untuk membangun komunikasi dalam satu koalisi karena telah berjuang bersama-sama di Pilpres 2024.

“Kemenangan dalam pilpres biasanya akan menjadi energi tambahan untuk meraih kemenangan di pilkada,” ujarnya.

Salah satu peluang Koalisi Indonesia Maju merapatkan barisan di Pilkada 2024 adalah mengusung Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai calon wali kota Solo.

DPC Partai Gerindra Kota Solo telah melakukan konsolidasi dengan PAN, PBB, Partai Golkar, dan PSI, pada Agustus lalu. Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, mengatakan kunjungan yang dilakukan untuk menyamakan pendangan menghadapi pesta demokrasi 2024.

“Kami berinisiatif mengunjungi teman-teman untuk bersialaturahmi dengan sesama partai koalisi. Untuk menyamakan visi bila nanti dari DPP kami sudah ada instruksi, tinggal tancap gas karena satu persepsi,” ujar dia.

Ardianto mengatakan safari politik ke parpol koalisi juga untuk membangun chemistry dalam menghadapi agenda politik ke depan. Dengan adanya chemistry di antara parpol koalisi, pergerakan bakal lebih efektif.

“Bila chemistry sudah terbangun dengan baik dengan pandangan dan pemikiran yang sama, ke depan akan lebih enak Bergeraknya. Ini penting mengingat kami berada di Solo yang adalah basis kompetitor,” kata dia.

Ardianto mengatakan ada kemungkinan koalisi Pemilu 2024 berlanjut untuk Pilkada Solo 2024. Namun hal itu masih harus melihat sejauh mana perkembangan politik ke depan. Tapi diakui ada kemungkinan ke situ.

“Sementara saya pribadi berpikir untuk koalisi Pemilu 2024. Tapi bila nanti ternyata chemistry-nya bagus, kenapa tidak ke Pilkada Solo. Kan ini sesuatu yang memang bisa dilanjutkan. Ada kemungkinan itu,” urai dia.

Apalagi gabungan koalisi itu sudah memenuhi syarat minimal jumlah kursi DPRD Solo untuk mengusung calon wali kota dan wakil wali kota. Ihwal figur yang akan diusung menurut dia bisa saja Kaesang Pangarep.

“Saya kemarin minta Mas Kaesang di Solo. Tapi kan ada wacana ke Depok. Sehingga tunggu saja dulu. Sedangkan untuk Cawawali atau pendamping Mas Kaesang bisa digandengkan dengan Mbak Sekar Golkar,” kata dia. ●RDO







“50-an persen pemilih Jawa transmigran memilih Ganjar sedangkan Prabowo di angka 30 an persen. Sedangkan etnis lokal Sumsel lebih dominan memilih sosok Anies dan Prabowo ketimbang Ganjar”

Fatkurohman

# ADU SIMPATI PADA MASYARAKAT JAWA DI SUMATERA

**Pemilu 2024 ini terbilang istimewa karena semua kandidat di pemilihan presiden (Pilpres) berasal dari Pulau Jawa. Meski demokrasi Indonesia sudah sangat maju dan bisa menerima dari semua kalangan namun tetap saja faktor kesukuan juga cukup menentukan.**

Secara kasat mata, persaingan di Pulau Jawa bisa dianalisa dengan jelas. Sehingga peta politik dari masing-masing calon di Pilpres 2024 sudah cukup cermat dibuat. Namun di luar Pulau Jawa, berbeda.

Di Pulau Sumatera, jumlah masyarakat Jawa sangat besar bahkan bisa mencapai diatas 30 persen. Jumlah tersebut jelas sangat menentukan dan memberi pengaruh yang besar. Selain di perkotaan mereka juga tersebar di pedesaan yang dulunya berstatus warga transmigrasi.

Pemilih Jawa di Sumatera Selatan misalnya, di Pilpres 2024 akan sangat menentukan terutama dalam menentukan suara tingkat provinsi. Berdasarkan data pada tahun 2022 ada sekitar 31 persen masyarakat Jawa transmigran yang ada di Sumatera Selatan.

Niat Prabowo mempersunting Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden RI Joko Widodo ingin mendapatkan kembali suara di Pilpres 2019 silam. Meski demikian juga tidak mudah karena harus bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Ketua Aliansi Masyarakat Pujakesuma Sumsel Lilik Agus Purwanto menilai, meski menggandeng Gibran Rakabuming, putra Jokowi namun Prabowo Subianto tidak mudah mendapat suara dari masyarakat Jawa.

Dimana dari hasil survei yang mereka dapatkan, Prabowo dan Ganjar akan bersaing ketat memperebutkan suara masyarakat Jawa di Sumsel. Faktor penentunya adalah sosok calon wakil presiden.

Sosok Ganjar dikenal dekat warga masyarakat eks transmigran yang memang kebanyakan berasal dari Jawa Tengah. Sementara dari Jawa Timur sebagian memilih Prabowo Subianto dan sebagian lagi Anies Baswedan.

“Tapi untuk masyarakat yang berasal dari Jawa Tengah, mereka juga terpecah ada yang pilih Prabowo karena Gibran dan Jokowi. Kemudian ada yang ke Ganjar karena faktor NU dari seorang Mahfud MD. Tinggal melihat prevalensi dari masyarakat, mau kemana mereka,” ungkap Agus.

Berkaca pada Pilpres 2019 lalu lanjut Agus, sebagian besar masyarakat Jawa di Sumsel memilih figur Jokowi. Tapi hal itu juga bukan jaminan karena mereka memilih faktor PDIP atau memang sosok Jokowi.

Untuk diketahui, warga Jawa yang datang ke Sumatera tahun 50-an, 60-an umumnya kaum Abangan yang cukup lekat dengan paham-paham Soekarno. Sementara generasi kedua, banyak warga transmigran ini menyekolahkan anaknya ke pesantren-pesantren. Sehingga dikenal sebagai generasi hijauan.

“Kalau yang generasi Abangan bisa jadi condong ke Ganjar Pranowo. Kalau generasi hijauan bisa memilih Prabowo Subianto yang didukung banyak kaum NU juga dan berbagi dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” ungkapnya.

Namun Lilik Agus meyakini kini Ganjar Pranowo dan

Prabowo Subianto akan bersaing ketat merebut simpati masyarakat Jawa di Sumatera Selatan.

Sementara Gubernur Paguyuban Republik Ngapak Sumsel Mukhtarudin Muchsiri mengungkapkan, mereka adalah kelompok masyarakat Ngapak Jawa Tengah yang diisi hampir 30 persen warga transmigran.

Ada perbedaan pandangan terhadap sosok Capres 2024 ini. Dimana faktor calon presiden faktor menentukan bagi warga Ngapak Sumsel. Mereka bisa saja memilih Prabowo namun bukan karena capresnya, melainkan sosok Gibran.

“Warga Ngapak di Sumsel ini sangat banyak namun kami sejak Pilpres 2019 sudah kecewa dengan Prabowo. Hal ini berdampak juga ke Pilpres 2024 nanti karena kalau sudah hati kecewa sulit kembali sembuhnya,” ungkap Mukhtarudin.

Sebagai Gubernur Ngapak di Sumsel Mukhtarudin bercerita kekecewaan war-ganya karena memberikan dukungan kepada Prabowo secara maksimal bahkan adanya bentrok secara emosional. Namun setelah itu Prabowo Subianto masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Warga Ngapak yang memilihnya tentu sangat kecewa.

Diakui Mukhtarudin, meski mereka tidak memilih Prabowo Subianto namun sosok Gibran Rakabuming Raka memberikan pandangan yang berbeda. Dimana gaya pidatonya justru membuat banyak orang terpukau.

“Dari tutur bahasanya Gibran orang cerdas dengan pilihan diksi yang memukau semua orang. Dari sana saya melihat dia layak mewakili kaum muda. Apa karena Gibran ada konsultan politik sampai dia bisa berkata-kata seperti itu saat berpidato,” ucapnya kagum.

Sebagai Gubernur Ngapak Sumsel, dia meyakini sebagian

besar anggotanya akan memilih Ganjar Pranowo. Selain pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kedekatan warga Ngapak secara emosional sudah sangat dekat.

Bisa Jadi Faktor Penentu

Melihat kekuatan suara dari masyarakat Jawa ini, pengamat politik dari Public Trust Institute (Putin), Fatkurohman meyakini suara dari kalangan tersebut menjadi penentu kemenangan di Pilpres 2024.

Fatkurohman mengungkapkan, pada pilpres 2019 lalu mayoritas pemilih Jawa di Sumatera Selatan menyumbang suara yang sangat signifikan pada Capres Joko Widodo sehingga mampu mengimbangi suara Prabowo di tingkat provinsi.

“Bahkan di Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu basis terbesar pemilih Jawa di Sumatera Selatan menjadi satu-satunya yang mampu dimenangkan Jokowi di Provinsi Sumsel,” ungkap Bung FK, sa-paannya.

Dijelaskan Bung FK, untuk pilpres 2024 dengan munculnya tiga pasang, pemilih Jawa terbelah di dua kandidat yakni Ganjar dan Prabowo. Dimana dalam jajak pendapat yang dilakukan pada Maret lalu di Dapil Sumsel I yang meliputi Palembang hingga Musi Rawas terlihat jelas Sumbangsih pemilih Jawa pada Ganjar dan Prabowo.

“50-an persen pemilih Jawa transmigran memilih Ganjar sedangkan Prabowo di angka 30 an persen. Sedangkan etnis lokal Sumsel lebih dominan memilih sosok Anies dan Prabowo ketimbang Ganjar,” terangnya.

Dengan gambaran ini, alumni Sosiologi FISIP Unsri ini menilai, secara struktur sosial politik kekuatan Ganjar ada pada pemilih Jawa transmigran namun belum maksimal karena

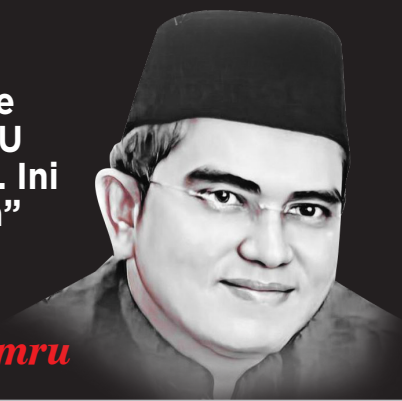
Prabowo juga mendapat elektoral yang bagus pada pemilihan ini terutama di Kabupaten Banyuasin yang saat ini masih menguasai basis terbesar Jawa di Sumsel ini.

Dengan Prabowo menggandeng Gibran bisa saja semakin kuat di basis Jawa. Untuk bisa bersaing di Sumsel Ganjar harus bisa memaksimalkan pemilih Jawa transmigran sebagai basis elektoral. Pemilih ini harus digarap maksimal.

•RDR







# GANJAR-MAHFUD PILIHAN WARGA NAHDLIYIN

**Tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kini, mereka bakal menentukan strategi untuk menarik suara pemilih, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), yang punya basis massa terbesar di Indonesia.**

Survei terbaru Alvara Research Center memotret pilihan politik warga NU atau Nahdliyin jelang Pilpres 2024. Ternyata, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung PKB, partai yang selama ini dianggap sebagai representasi politik NU, tak banyak dipilih oleh kaum Nahdliyin.

Peneliti Senior Alvara Research Center, Lilik Purwandhi, menjelaskan, pihaknya mengetahui pilihan politik warga NU dengan lebih dulu menanyakan kepada semua responden apakah merasa dekat/terafiliasi dengan ormas NU. Hasilnya, 40,7 persen dari total responden mengaku terafiliasi dengan NU.

Responden yang warga NU itu lantas diberikan pilihan tertutup tiga pasangan capres-cawapres. Hasilnya, 36,7 persen warga NU memilih pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Lalu, 33,2 persen kaum Nahdliyin memilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Adapun warga NU yang memilih pasangan Anies-Cak Imin hanya 13,8 persen. Selain itu, ada 13,8 persen yang belum menentukan pilihan.

“Terjadi persaingan ketat pada pemilih NU, meskipun saat ini menyebar lebih banyak pada pemilih Ganjar-Mahfud MD” kata Lilik lewat siaran persnya, Selasa, 24 Oktober 2023.

Secara keseluruhan, survei yang dilakukan pada 1–6 Oktober 2023 di semua provinsi ini menemukan bahwa elektabilitas Ganjar-Mahfud berada di urutan pertama dengan raihan 36,5 persen. Lalu disusul pasangan Prabowo-Gibran dengan elektabilitas 30,1 persen dan Anies-Imin dengan tingkat keterpilihan 19,4 persen. Masih ada 13,9 persen responden yang belum menentukan pilihan.

Lilik menyebut, berdasarkan hasil sigi tersebut, Pilpres 2024 berpotensi berlangsung dua putaran. Putaran kedua kemungkinan akan diikuti oleh pasangan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.

“Semua pasangan masih memiliki peluang untuk meningkatkan elektabilitasnya, namun pasangan Ganjar-Mahfud MD dan Prabowo-Gibran diprediksi akan lanjut berkontestasi pada putaran kedua,” ujarnya.

Sebagai gambaran, pilpres digelar satu putaran saja apabila ada pasangan capres-cawapres yang memperoleh 50 persen lebih suara dari total suara sah. Apabila tidak ada, maka harus dilaksanakan pilpres putaran kedua alias pemilih mencoblos ulang.

Pilpres putaran kedua diikuti oleh dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama. KPU menjadwalkan pencoblosan putaran kedua pada 26 Juni 2023. “Pasangan terpilih diperkirakan baru akan diketahui pada bulan Juli 2024 nanti,” kata Lilik.

Sebelumnya, berdasarkan survei LSI Denny JA pada 4-12 September 2023, pasangan Prabowo-Gibran unggul diantara pemilih NU dengan persentase 44,6 persen, disusul Ganjar-Mahfud sebesar 36,5 persen. Sedangkan, Anies-Cak Imin yang cawapresnya adalah Ketua Umum PKB sekaligus keluarga besar NU justru berada di posisi ketiga dengan 15 persen.

“Prabowo-Gibran unggul di NU, Ganjar-Mahfud di posisi kedua, dan Anies-Muhaimin di posisi ketiga,” ujar Peneliti LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas, dalam keterangannya, Rabu, 25 Oktober 2023.

Sedangkan, di pemilih Muhammadiyah, pasangan Ganjar-Mahfud unggul dengan persentase 52,6 persen diikuti Anies-Baswedan 21,1 persen, dan

Prabowo-Gibran di posisi ketiga dengan 19,4 persen.

“Pemilih Anies-Muhaimin paling banyak terkonsentrasi dari Muhammadiyah, walau masih di bawah Ganjar-Mahfud,” ujar Hanggoro.

Dalam survei ini, basis pemilih NU sebanyak 58,9 persen dan Muhammadiyah 5,4 persen. Sedangkan di pemilih ormas lainnya Prabowo-Gibran unggul 32,5 persen, diikuti Ganjar-Mahfud 23,1 persen, dan Anies-Muhaimin 15,4 persen.

Di pemilih yang tidak merasa bagian dari ormas mana pun atau independent, sebanyak 50 persen mendukung Ganjar-Pranowo, 43,9 persen memilih Prabowo-Gibran, dan Anies-Muhaimin hanya 0,5 persen.

Sementara, di pemilih yang beragama Islam, pilihan paling banyak kepada Prabowo-Gibran 41,2 persen. Lalu, di pemilih yang beragama non-Islam, pilihan paling banyak kepada Ganjar-Mahfud 57,7 persen dan bagi Anies-Muhaimin, pemilih non-Islam yang mendukung mereka satu persen.

Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), menilai tingginya elektabilitas Ganjar-Mahfud dari suara pemilih warga Nahdliyin karena hubungan sejarah erat antara PDIP dengan warga Nahdliyin.

Menurut Gus Falah, ada beberapa hal yang menyebabkan elektabilitas Ganjar-Mahfud kokoh di kalangan kiai dan santri NU. Yaitu, faktor kesejarahan dan alasan sosiologis. Karena itu, menurut dia, tidak mengherankan bahwa Ganjar-Mahfud merupakan pilihan tepat bagi kiai dan santri NU.

“Saat itu, PNI tidak kaget ada NU, begitu pula NU tidak kaget ada PNI. Sekarang pun, PDIP senang dan apresiasi keberadaan NU, NU pun begitu apresiasi adanya PDIP,” ujar Gus Falah di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.

Gus Falah menyebutkan bahwa hubungan sejarah antara klan-

gan nasionalis-religius sudah terjalin sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Selain itu, di tingkat masyarakat, hubungan baik PDIP-NU terlihat dalam berbagai kesempatan, ketika ada acara NU dan Nahdliyin pasti ada kader PDIP yang datang.

“Kondisi ini sama ketika ada tontonan jaranan, reog ada warga NU yang nonton,” ujarnya.

Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, dari hubungan sejarah yang mengental itu, maka tidak salah hasil survei menyebutkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud unggul di kalangan warga NU. “Lalu faktor kedua, silaturahmi PDIP ke NU selalu hangat. NU ke PDIP pun hangat. Ini salah satu faktornya,” ujarnya.

Untuk itu, Gus Falah menegaskan bahwa faktor utama tingginya elektabilitas Ganjar-Mahfud di kalangan warga NU adalah kuatnya dukungan di akar rumput atau grassroots. Ia menilai basis utama PDIP dan NU bertemu hingga di tingkat desa, dusun dan perkampungan sehingga hubungannya semakin menguat.

## Duet Amin Mendekat

Sementara itu, lembaga survei dunia asal Prancis, Ipsos Public Affair, mengungkap elektabilitas pasangan Anies-Cak Imin meroket usai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres. Elektabilitas Anies-Muhaimin dalam survei yang berlangsung pada 17-19 Oktober 2023 menunjukkan angka 28,91 persen.

Angka elektabilitas Anies-Cak Imin berbeda tipis dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 31,32 persen. Sedangkan, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD unggul tipis dengan angka elektabilitas 31,98 persen.

“Simulasi pertama hasilnya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (28,91 persen), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (31,98 persen), sedangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (31,32 persen),” kata Senior Researcher Ipsos, Arif Nurul Iman, lewat keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Adapun menurut hasil temuan Ipsos, elektabilitas Prabowo meningkat ketika dipasangkan dengan Erick Thohir ketimbang Gibran. Ketika Prabowo Subianto dipasangkan dengan Erick Thohir, raihan suaranya adalah 37,53 persen. Prabowo-Erick unggul dibandingkan dengan Ganjar Pranowo-Mahfud dengan 31,73 persen dan Anies-Cak Imin 28,91 persen.

Ipsos juga merilis hasil survei head to head antara Prabowo-Gibran melawan Ganjar-Mahfud. Temuannya menunjukkan Ganjar-Mahfud unggul dengan margin yang cukup mencolok. “Merujuk data yang ada, pada simulasi dua pasangan calon, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berhadapan dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, ditemukan bahwa publik lebih memilih pasangan Ganjar-Mahfud 48,72 persen, dengan jarak suara yang cukup signifikan dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 41,67 persen,” ujarnya. •RDO

